

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 – 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto 77
Telp. (0323) 321500 – 323003
SAMPANG 69213

Email : disdiksampang@yahoo.co.id
Telpon/Fax : 0323-321500

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 dapat diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang telah menyiapkan dokumen ini.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2019 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang akan dicapai dalam periode 2019 – 2024. Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Sampang terpilih, dengan fokus pada **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat..**

Kami jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat Ridho Allah SWT. Amin.

Sampang, Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

H. M. JUPRI RIYADI, SH, S.Pd
NIP. 19651007 198803 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan	1-5
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra.....	1-6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	2-1
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	2-19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	2-42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah Terpilih ...	3-10
3.3. Telaahan Renstra K/L & Renstra PD Propinsi	3-12
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	3-14
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	3-14
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	4-1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	5-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	5-1
6.1 Program dan Kegiatan	6-1
6.2. Indikator Kinerja	6-14
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN	7-1
BAB VIII : P E N U T U P	8-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD mencakup: tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra; program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Dasar dalam penyusunan Renstra PD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah.

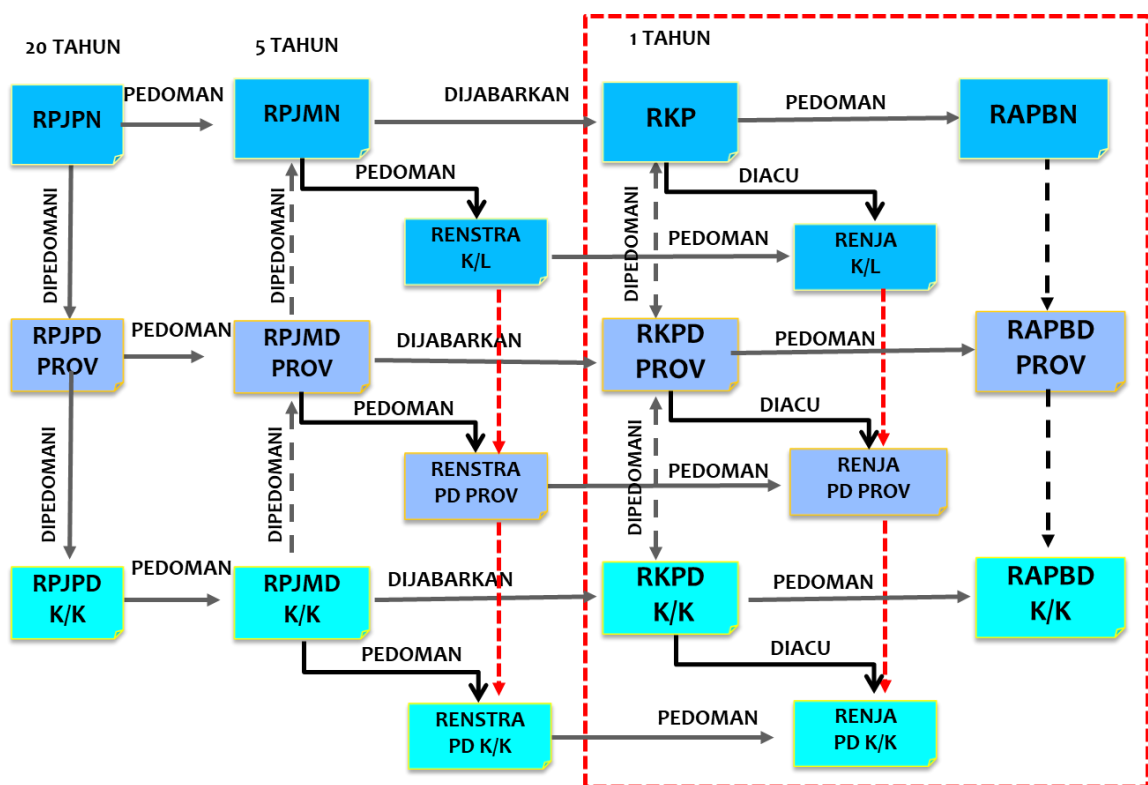
Dalam Penyusunan dokumen Renstra PD mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 OPD diarahkan untuk tidak saja mengacu pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah pada instansi vertikal, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi dan misi semata, namun terkandung konsep estimasi terhadap penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Proses penyusunan Renstra PD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisa data, penetapan isu dan sasaran strategis, dan konsultasi publik. Renstra yang disusun ini berdasarkan pada data dan mengupayakan pelibatan stakeholders yang lebih luas sehingga akan memberikan dukungan pada tahap pelaksanaan perencanaan

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2019 - 2024 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 24. Peraturan Bupati Sampang Nomer 75 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas Pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang adalah memberikan arah pelaksanaan/ penyelenggaraan pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat cerdas Islami.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan.
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA dan RAPBD).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Sampang. Tercapainya sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

- 5.1 Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

5.3 Kebutuhan Pendanaan Indikatif

BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Agar organisasi lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas tersebut mempunyai lima fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

✚ Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

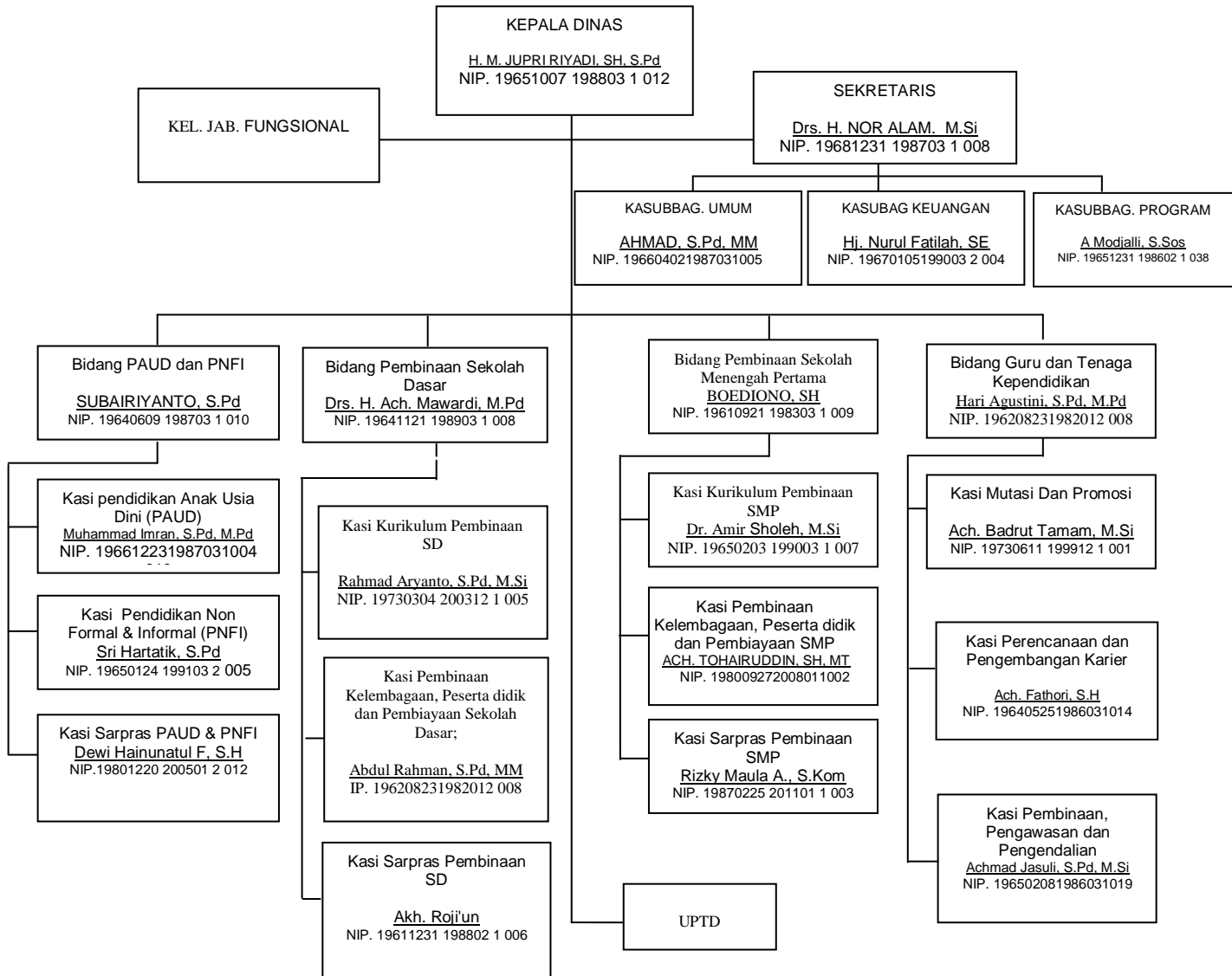
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Peserta didik dan Pembiayaan Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Peserta didik dan Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - 1. Seksi Mutasi dan Promosi;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karier;
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
- g. UPT Dinas dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- ✚ Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- ✚ Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- ✚ Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- ✚ Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG SESUAI PERBUP NO 75 TAHUN 2016**



1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protocol. Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;

- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretaris membawahi:

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”); dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program;
- c. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- e. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- g. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan,

pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitasi penerapan standar teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal.

Adapun fungsi dari Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal adalah:

- a. perencanaan dan pelaksanaan anggaran seluruh Seksi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- b. penyelenggaraan/penerapan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d. penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. penetapan bahan ajar yang relevan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal
- f. petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidik, siswa dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- h. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pendidik, siswa dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- i. penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan soal-soal ujian dan penilaian hasil belajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
- k. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- l. pelaksanaan fasilitasi akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas;

- m. pemberian ijin operasional, rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- n. pelaksanaan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- o. pengkoordinasian dan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- p. pelaksanaan usulan pembangunan sekolah, rehabilitasi gedung sekolah, dan pembangunan kantor serta bangunan fasilitas penunjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan`
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi:

A. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas:

- a) merencanakan dan melaksanakan anggaran Seksi pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- b) menyelenggarakan/menerapkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- c) menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini;
- d) menyusun kelender dan bahan ajar Pendidikan Anak Usia Dini;
- e) menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini;
- f) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g) mengadakan pengembangan manajemen untuk peningkatan mutu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- h) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- i) memberikan ijin operasional pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j) melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- k) mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal.

B. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal, mempunyai tugas:

- a) merencanakan dan melaksanakan anggaran Pendidikan Non Formal dan Informal;
- b) menyelenggarakan/menerapkan kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c) menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d) menetapkan kelender, bahan ajar dan jam efektif Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e) menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Non Formal dan Informal;
- f) menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- h) mengadakan pengembangan manajemen peningkatan mutu lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
- i) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal dan Informal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j) memberikan ijin operasional pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;

- k) melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga-lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
- l) mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal.

C. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, mempunyai tugas:

- a) merencanakan dan melaksanakan anggaran Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- b) melaksanakan pembangunan lembaga, rehabilitasi gedung, dan pembangunan kantor serta bangunan fasilitas penunjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c) melaksanakan pendistribusian subsidi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d) melaksanakan pengadaan, pendistribusian bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. Bidang tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- b. pengkoordinasian pengelolaan kurikulum Sekolah Dasar
- c. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- d. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik dan pembiayaan Sekolah Dasar;
- e. penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Inklusi;
- g. penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi
- h. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Inklusi;
- i. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- j. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- k. pengadaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- l. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional –Sekolah Dasar dan pelaksana akreditasi lainnya;
- m. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- n. pengusulan penetapan, pendirian dan penutupan lembaga pendidikan Sekolah Dasar;
- o. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar;
- p. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Dasar;
- q. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;

- r. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar pendidikan sekolah Dasar, serta distribusi pengadaan sarana pendidikan Sekolah Dasar; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi:

- A. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
 - c. menyusun dan menyebarluaskan kelender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
 - d. menyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
 - e. menetapkan bahan ajar yang relevan pada pendidikan Sekolah Dasar
 - f. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
 - g. menyusun soal dan mengendalikan pelaksanaan ujian Sekolah Dasar;
 - h. mendistribusikan Blanko Ijazah;
 - i. mengkoordinir Pengiriman Pelatihan-pelatihan guru Pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Inklusi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

- B. **Seksi Pembinaan Kelembagaan, Peserta didik dan Pembiayaan Sekolah Dasar**, mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa dan peserta didik pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
 - b. melakukan Pembinaan kelembagaan ke Sekolah Dasar;

- c. menyusun pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Sekolah Dasar serta mengendalikan pelaksanaannya;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Inklusi;
- e. mengadakan pengembangan kelembagaan peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
- f. membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar. Badan Akreditasi Nasional - dan pelaksanaan akreditasi lainnya;
- g. menetapkan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
- h. melaksanakan pembinaan prestasi siswa Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
- i. melakukan Pembinaan penyusunan Rencana Kerja Sekolah;
- j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Biaya Operasional Sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar;
- k. membantu memfasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Dasar; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

C. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Sekolah Dasar;
- b. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar
- c. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan pendidikan Sekolah Dasar;
- d. merencanakan dan memberi bantuan peralatan IT untuk pendidikan Sekolah Dasar; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengkoordinasian pengelolaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- d. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik dan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Inklusi;
- g. penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- h. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Inklusi;
- i. penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- j. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- k. pelaksanaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi

- l. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama, dan pelaksana akreditasi lainnya;
- m. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- n. pengusulan penetapan, pendirian dan penutupan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- o. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional Sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- p. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- q. Pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi
- r. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta distribusi pengadaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- s. pemfasilitasian kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan perguruan tinggi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi:

- A. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Pertama** mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
 - c. menyusun dan menyebarluaskan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
 - d. menyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;

- e. menetapkan bahan ajar yang relevan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
- g. menyusun soal dan mengendalikan pelaksanaan ujian pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- h. mendistribusikan Blanko Ijazah;
- i. mengkoordinir Pengiriman Pelatihan-pelatihan guru Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Inklusi;
- j. memfasilitasi kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan perguruan tinggi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

B. Seksi Pembinaan Kelembagaan, peserta didik dan Pembiayaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa dan peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
- b. melakukan Pembinaan kelembagaan ke Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta mengendalikan pelaksanaannya;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Inklusi;
- e. mengadakan pengembangan kelembagaan peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
- f. membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Badan Akreditasi Nasional- dan pelaksana akreditasi lainnya;
- g. menetapkan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- h. melaksanakan pembinaan prestasi siswa Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;

- i. melaksanakan pendataan dan pembinaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Inklusif secara berkala;
- j. melakukan Pembinaan penyusunan Rencana Kerja Sekolah;
- k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Biaya Operasional Sekolah dan bantuan/subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- l. melaksanakan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

C. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. mengadakan perencanaan pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusif
- b. merencanakan, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, ruang belajar dan ruang-ruang lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan alat peraga pembelajaran serta buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. merencanakan dan memberi bantuan peralatan Teknologi Informasi untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Guru dan

Tenaga Kependidikan. Adapun fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan dan analisis keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. penetapan bahan kebijakan teknis pembinaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- d. penyusunan dan melaksanakan program standarisasi kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan karier Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:

A. Seksi Mutasi dan Promosi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan dan analisis kenaikan pangkat jabatan guru dan tenaga kependidikan;
- b. melaksanakan proses kenaikan pangkat dan berkala jabatan guru dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan usulan promosi dan mutasi guru dan tenaga kependidikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

B. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karier mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendataan/analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
- b. melaksanakan proses sertifikasi guru dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan pelatihan dalam rangka sertifikasi jabatan guru dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan perencanaan pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

C. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan;
- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
- f. menyiapkan bahan pengembangan karier bagi guru dan tenaga pendidikan;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai bagi guru dan tenaga kependidikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan sebanyak 73 orang PNS dengan rincian:

- Golongan IV = 15 orang ;
- Golongan III = 45 orang ;
- Golongan II = 13 orang ;

Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan, terdiri dari:

- S3 = 1 orang ;
- S2 = 26 orang ;
- S1 = 24 orang ;
- D3 = 3 orang ;
- SMA = 19 orang ;

Total asset yang dimiliki Dinas Pendidikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 203.497.821.331.723,87 dengan rincian pertahun sebagai berikut: asset tahun 2013 sebesar Rp. 26.722.971.607,11 tahun 2014 sebesar Rp. 9.320.442.677,17 tahun 2015 sebesar Rp. 28.519.852.114,71 tahun 2016 sebesar Rp. 37.082.792.528,00 tahun 2017 sebesar Rp. 59.407.616.776,39 dan tahun 2018 sebesar 42.443.656.020,00,

Selain sumber daya yang disebutkan diatas, sumber daya yang dimiliki di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan Penduduk Usia 4-6 Tahun dan Perkembangan Pendidikan Anak Usia

Sebagaimana disajikan pada Tabel 7, selama dua tahun terakhir jumlah peserta didik PAUD Formal dan Non Formal terus meningkat, dari sebanyak 22.602 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 23.730 orang pada tahun 2018. Peningkatan jumlah peserta didik tersebut juga disertai dengan peningkatan jumlah lembaga, ruang kelas dan guru TK serta peningkatan APK-nya.

Tabel 2.2
Perkembangan Penduduk, Siswa, Sekolah, Ruang Kelas,
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2017 s.d. 2018

No.	URAIAN	2017	2018	KET
1	Jumlah Penduduk 4-6	35.193	35.397	
2	Jumlah Lembaga	714	853	
	TK	275	296	
	KB	330	409	
	TPA	1	2	
	SPS	108	146	
3	Jumlah Siswa	22.602	23.730	
	TK	11.313	11.683	
	KB	8.134	9.120	
	TPA	17	17	
	SPS	3.138	2.910	
4	Rombel	1.640	1.462	
5	APK PAUD	83	85,44	

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2017 s/d 2018

Namun, sebaliknya, jumlah penduduk usia PAUD atau penduduk usia 4 sd 6 tahun di Kabupaten Sampang meningkatnya relatif rendah dengan jumlah sebanyak 35.193 orang pada tahun 2017 menjadi 35.397 orang pada tahun 2018. Hal yang sama terjadi pada jumlah siswa, guru, lembaga dan Rombel kecendrungan naik.

b. Perkembangan Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Perkembangan SD/MI

Berbeda dengan jenjang TK serta SLB, pada jenjang pendidikan SD/MI, peningkatan jumlah siswa dan peningkatan APM dan APK SD/MI pada kurun waktu tahun 2013 sd tahun 2013 terjadi fluktuasi, juga disertai dengan penurunan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebagaimana data pada Tabel 8.

Tabel 2.3
Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas
Dan Angka Partisipasi Kasar SD dan MI Tahun 2013 s.d. 2018

No.	Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk Usia 7-12 tahun	Orang	117.768	114.824	107.087	105.481	108.727	112.924
2	Sekolah	Lemb	1.084	1.087	1.037	1.095	1.099	1.095

No.	Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	a. SD	Lemb	601	608	614	618	621	616
	b. MI	Lemb	483	479	423	477	478	479
3	Siswa	Orang	130.829	129.833	118.854	120.437	119.212	120.889
	a. SD	Orang	82.336	82.077	77.550	76.085	74.361	73.133
	b. MI	Orang	48.493	47.756	41.304	44.352	44.851	47.756
4	Guru	Orang	11.754	11.921	10.741	7.352	8.433	9.304
	a. SD	Orang	6.350	6.394	6.094	5.849	5.159	5.087
	b. MI	Orang	5.404	5.527	4.647	1.503	3.274	4.217
5	Ruang Kelas	R.Kelas	6.143	6.557	5.142	5.433	5.754	8.441
	a. SD	R.Kelas	3.539	3.643	3.076	3.660	3.671	3.831
	b. MI	R.Kelas	2.604	2.914	2.066	1.773	2.083	4.610
6	APK SD/MI	%	112,08	114,18	110,99	115,39	112,11	109,32
7	APM SD/MI	%	96,97	95,32	94,44	98,65	97,31	97,40

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2013 s/d 2018

Namun demikian, meskipun jumlah penduduk usia, jumlah siswa serta APM dan APK meningkat, tetapi jumlah lembaga dan jumlah ruang kelas justru menurun, sedangkan jumlah gurunya meningkat. Penurunan jumlah lembaga dan ruang kelas tersebut terutama terjadi karena dilaksanakannya program regrouping SD.

Jika dibandingkan kondisi SD dengan MI, tidak terdapat perbedaan yang menyolok yaitu jumlah siswa SD dibanding MI berkisar hampir 1 berbanding satu, sedangkan jumlah guru berkisar 1 berbanding 1, perbandingan jumlah lembaga berkisar 1 berbanding 1, sedangkan jumlah ruang kelasnya berkisar 1 berbanding 1.

c. Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Perkembangan SMP/MTs

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, sebagaimana disajikan pada Tabel 9, selama kurun waktu tahun 2013 s.d 2018 terdapat keadaan yang berfluktuasi, jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2013 s/d 2018 naik, demikian juga dengan jumlah siswa siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun. Sedangkan jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya maupun jumlah lulusannya selalu naik pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2018 juga naik. Keadaan yang berfluktuasi tersebut tidak terjadi pada prosentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK.

Meskipun terjadi kondisi yang berfluktuasi pada sebagian besar aspek, tetapi ternyata baik APK maupun APM-nya konstan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, yang berarti bahwa penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun tidak terhambat. Aspek yang juga konstan meningkat dalam kurun waktu tersebut adalah jumlah guru dan jumlah ruang kelasnya.

Jumlah lembaga SMP/MTs secara keseluruhan mengalami kenaikan mulai tahun 2013 s.d. tahun 2018. Keadaan tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah siswanya juga mengalami kenaikan yang signifikan, karena jumlah siswa SMP/MTs. Naik pada tahun 2013 sebanyak 53.492 naik sedikit menjadi 53.913 pada tahun 2018.

Tabel 2.4
Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun , Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas dan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2013-2018

No	Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk Usia 13-15 Th	Orang	44.880	53.172	51.015	105.481	54.375	55.175
2	Sekolah	Lemb.	402	422	425	473	486	481
	a. SMP	Lemb.	189	204	216	255	261	255
	b. MTs	Lemb.	213	218	209	218	225	226
3	Siswa	Orang	53.492	51.664	50.208	51.354	52.591	53.913
	a. SMP	Orang	30.453	28.746	29.183	31.176	31.432	30.995

No	Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	b. MTs	Orang	23.039	22.918	21.025	20.178	21.159	22.918
4	Guru	Orang	5.016	6.161	6.025	5.136	4.479	4.360
	a. SMP	Orang	3.025	3.091	3.191	2.360	2.118	2.055
	b. MTs	Orang	1.991	3.070	2.834	2.776	2.361	2.305
5	Ruang Kelas	Kelas	1.590	1.982	1.900	2.194	1.723	1.969
	a. SMP	Kelas	905	1.084	1.081	1.264	1.128	1.142
	b. MTs	Kelas	685	898	819	930	595	827
6	APK SMP/MTs	%	105,46	102,03	98,42	103,81	102,18	102,11
7	APM SMP/MTs	%	80,04	73,82	70,40	73,62	73,86	74,76

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2013 s/d 2018

d. Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Perkembangan SMA/MA/SMK

Pada kurun waktu tahun 2013 s.d 2018, perkembangan penduduk usia 16-18 tahun tidak jauh berbeda dengan perkembangan penduduk usia 7-12 tahun, juga dengan perkembangan penduduk usia 13-15 tahun. Penduduk usia 16-18 tahun 2008 s/d 2012, cenderung stabil.

Sedangkan jumlah siswa SMA dan SMK usia 16-18 tahun maupun jumlah siswa keseluruhan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, sedangkan jumlah siswa MA juga mengalami peningkatan mulai tahun 2013 sampai tahun 2018, demikian juga jumlah guru MA dan lembaga MA setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah guru pada lembaga SMK mengalami naik dan turun.

Peningkatan yang konstan juga terjadi pada APK dan APM secara keseluruhan, Apabila dirinci berdasarkan jenis sekolah, APK masing-masing lembaga mengalami peningkatan.

Tabel 2.5
Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun , Siswa, Guru, Sekolah,
Ruang Kelas, dan Angka Partisipasi Kasar SMA, SMK, dan MA
Tahun 2013-2018

No.	Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk Usia 16-18 tahun	Orang	50.071	53.075	52.775	52.992	56.728	58.670
2	Sekolah	Lembaga	170	198	191	233	238	235
	a. SMA	Lembaga	44	60	51	76	79	76
	b. SMK	Lembaga	43	54	52	73	73	73
	c. MA	Lembaga	83	84	88	84	86	86
3	Siswa	Orang	24.598	28.475	28.039	32.179	30.339	34.413
	a. SMA	Orang	8.175	9238	8.599	11.434	11.292	11.895
	b. SMK	Orang	5.552	6559	6.834	9.011	9.355	9.840
	c. MA	Orang	10.871	12678	12.606	11.734	9.692	12.678
4	Guru	Orang	2.688	3.412	3.266	5.239	2.496	2.743
	a. SMA	Orang	788	1063	933	1.543	783	760
	b. SMK	Orang	653	856	880	1.292	645	647
	c. MA	Orang	1.247	1493	1.453	2.404	1.068	1.336
5	Ruang Kelas	R.Kelas	823	940	878	1.247	1.308	150
	a. SMA	R.Kelas	226	321	287	422	451	348
	b. SMK	R.Kelas	165	252	216	357	389	331
	c. MA	R.Kelas	432	367	375	468	468	468
6	APK SM	%	52,56	58,02	53,13	63,51	57,57	63,09
7	APM SMA	%	41,79	39,25	38,67	44,48	43,85	45,90

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2013 s/d 2018

e. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal / Informal

Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program pendidikan luar sekolah meliputi : (1) Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional; (2) Paket A setara SD; (3) Paket B

setara SMP; (4) Paket C setara SMA; (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) Pendidikan berkelanjutan dan pendidikan keluarga.

Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional adalah untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Tabel 14 Menunjukkan banyaknya penduduk buta huruf kelompok usia 15 tahun ke atas dan jenis kelamin. Dilihat dari prosentase penduduk buta huruf maka Angka Buta Huruf sebesar 7.57 % sedangkan Angka Melek Huruf sebesar 92,43 %.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Buta Huruf Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Sampang Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JML PDD USIA 15 TH KEATAS YANG DAPAT BACA TULIS	JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS	ANGKA MELEK HURUF	JML PDD U15 THN KEATAS YG BUTA HURUF	ANGKA BUTA HURUF
1	KEC. SRESEH	26.967	36.490	73,90	9.523	26,10
2	KEC. TORJUN	21.901	21.906	99,98	5	0,02
3	KEC. SAMPANG	32.495	33.185	97,92	690	2,08
4	KEC. CAMPLONG	45.075	45.746	98,53	671	1,47
5	KEC. OMBEN	12.351	14.432	85,58	2.081	14,42
6	KEC. KEDUNGUNG	56.190	59.616	94,25	3.426	5,75
7	KEC. JRENGIK	48.278	51.888	93,04	3.610	6,96
8	KEC. TAMBELANGAN	79.103	80.798	97,90	1.695	2,10
9	KEC. BANYUATES	46.002	46.041	99,91	39	0,09
10	KEC. ROBATAL	13.737	19.986	68,73	6.249	31,27
11	KEC. KETAPANG	56.160	60.566	92,72	4.406	7,28
12	KEC. SOKOBANAH	44.255	54.029	81,91	9.774	18,09
13	KEC. KARANGPENANG	21.694	25.249	85,92	3.555	14,08
14	KEC. PANGARENGAN	63.190	63.943	98,82	753	1,18
	JUMLAH	567.398	613.878	92,43	46.480	7,57

Sumber : Data Profil Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2012/2013

Program Paket A setara SD dan Paket B setara SMP adalah untuk menampung siswa putus sekolah pada jenjang SD dan SMP untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan jenjang tersebut.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan

berkelanjutan dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia dini, namun datanya sudah dibahas diatas bersama PAUD Formal

Satuan pendidikan dalam pendidikan luar sekolah adalah Kelompok Belajar (Kejar). Peserta didik pada jalur pendidikan luar sekolah disebut warga belajar, sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar.

Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Kejar Paket A (untuk buta aksara Latin dan Angka Arab, buta Bahasa Indonesia, buta pendidikan dasar), Kejar Paket A setara SD (untuk putus sekolah SD), dan Kejar Paket B setara SMP (untuk putus sekolah SMP), sedangkan untuk jenis pendidikan kejuruannya, oleh pemerintah diselenggarakan dalam bentuk Kejar Usaha (KBU) yang terdiri berbagai rumpun ketrampilan.

Satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat /swasta adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Lembaga Kursus, Dalam pada itu, khusus bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun *Balita) diselenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan satuan-satuan pendidikan sekolah maupun luar sekolah serta program lintas sektoral yang relevan. Termasuk didalamnya pendidikan berkelanjutan ini adalah pendidikan bagi masyarakat yang tidak/belum memiliki keterampilan dan tidak/belum bekerja serta tidak mampu karena faktor ekonomi, agar dapat berkompetisi di dunia kerja maupun berusaha membuka lapangan kerja.

Pada Tabel 16 tampak bahwa jumlah warga belajar Paket C lebih banyak dibanding dari Paket B dan A, yaitu 2.553 orang berbanding 2.257 dan 1.602 orang. Ini berarti masyarakat yang putus sekolah tingkat SMA, lebih banyak dari yang putus sekolah tingkat SD dan SMP, akan tetapi jumlah kelompok belajar antara Paket A, Paket B dan Paket C sebanyak 32 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Tabel 8
Jumlah Warga Belajar, Kelompok Belajar, dan Tutor Tahun 2018

No.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Lembaga PKBM	32	
2	Jumlah WB	6.413	
	Paket A	1.602	
	Paket B	2.257	
	Paket C	2.553	
3	Tutor	162	

Sumber Data : Profil Pendidikan tahun 2018/2019

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Renstra		
Uraian	Indikator Kinerja	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan disemua jenjang	a	APK PAUD
	b	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
	c	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
	d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
	e	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Meningkatnya akreditasi sekolah	f	Prosentase sekolah dengan akreditasi A
Meningkatnya IKM Layanan Pendidikan	g	IKM Pelayanan Pendidikan

Sedangkan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selama periode Renstra sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan																					
a	APK PAUD				77,75	80,03	85,23	84,26	88	90	77,75	80,03	85,23	84,26	83,05	85,44	100	100	100	100	93,48	94,93
b	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A				112,08	114,18	112,46	115,39	110,8	109,8	112,08	114,18	112,46	115,39	112,11	109,32	100	100	100	100	101,18	100,44
c	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				96,97	95,32	97,88	98,65	100	100	96,97	95,32	97,88	98,65	97,31	97,40	100	100	100	100	97,31	97,40
d	Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B				105,46	102,03	105,04	105,74	107	106	105,46	102,03	105,04	105,74	102,18	102,11	100	100	100	100	95,50	103,80
e	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				80,04	76,8	77,21	81,72	90	95	80,04	76,8	77,21	81,72	73,86	74,76	100	100	100	100	82,27	78,31
2	Meningkatnya akreditasi sekolah																					
f	Prosentase sekolah dengan akreditasi A							5	7	5				5	3,97	4,2				100	56,71	80,4
3	Meningkatnya IKM Layanan Pendidikan																					
g	IKM Pelayanan Pendidikan						81,85	83,8	86	89			81,85	83,8	81,24	83,97			100	100	94,47	94,27

Sasaran Pertama ” *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan*” ada 5 indikator dengan capaian sebagai berikut.:

1. Pada tahun 2018 capaian APK PAUD sebesar 85,44%, berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan anaknya pada sekolah TK dan PAUD Sejenis (PAUDNI). Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan layanan, daya tampung lembaga PAUD, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Capaian APK SD/MI pada tahun 2018 sebesar 109,32%, berada diatas target yang ditetapkan sebesar 109,8%. Adapun upaya yang dilakukan seperti: (1) sosialisasi kepada masyarakat terutama pada orang tua yang mempunyai putra diusia sekolah, (2) banyaknya dana bantuan yang diberikan kepada siswa, (3) terpenuhinya sarana dan prasarana yang semakin memadai, mulai dari pemeliharaan, rehab sampai dengan pembangunan ruang kelas dan pembangunan gedung sekolah.
3. APM SD/MI pada tahun 2018 mencapai 97,40%, berada dibawah target sebesar 100%. Hal ini disebabkan karen masih ada anak masuk SD/MI dibawah dari usia yang dipersyaratkan, hal ini dikarenakan perkembangan pendidikan pra sekolah sudah bagus sehingga kesiapan anak untuk masuk SD/MI menjadi lebih cepat apalagi dengan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Untuk itu diperlukan regulasi yang lebih baik dalam penerimaan anak didik baru.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B pada tahun 2018 diperoleh dari jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 56.338 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun sebanyak 55.175 siswa. Dengan demikian capaian APK SMP SMP/MTs/Paket B sebesar 102,11 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 106%, karena jumlah lembaga ditingkat SMP/MTs sudah memadai.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sejumlah 41.250 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun sebanyak 55.175 siswa. Dengan demikian capaian APM SMP/MTs/Paket B sebesar 74,76 %. Belum

mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% karena masih banyak siswa yang masuk sekolah lebih awal atau melebihi dari usia yang seharusnya masuk jenjang SMP/MTs (13 – 15 Tahun).

Sasaran kedua *"Meningkatnya Akreditasi sekolah"* ada 1 indikator dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sekolah dengan akreditasi A, diperoleh dari jumlah sekolah SD dan SMP yang akrediasinya A sebanyak 35 lembaga dibagi dengan jumlah seluruh sekolah SD/SMP sebanyak 871 lembaga. Capaian persentase sekolah dengan akreditasi A pada tahun 2018 sebesar 4,02% dari target sebesar 5%, sehingga capaiannya sebesar 80,4%. Realisasi capaian masih dibawah target hal ini disebabkan kurang maksimalnya pembinaan kelembagaan sekolah. Akreditasi sekolah dikeluarkan oleh BAN (Badan Akreditasi Nasional) dengan kategori A, B, C dan Tidak Terakreditasi

Sasaran ketiga *"Meningkatnya IKM Layanan Pendidikan"*, Realisasi capaian dari 1 indikator sebagai berikut :

1. IKM Pelayanan Pendidikan pada tahun 2018 sebesar 83,90%, indikator ini dibawah target karena adanya perubahan metode pada perhitungan survey yang dilakukan, target sebesar 89% disusun sebelum adanya perubahan metode yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Namun capaian ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dapat di lihat pada tabel di bawah ini (Tabel 2.3.2)

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang 2013 – 2018

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISAI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISAI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	DINAS PENDIDIKAN	475.682.717.910	498.389.666.115	571.052.640.139	524.055.210.680	541.624.843.324	548.365.862.916	443.081.560.893	447.820.158.644	476.222.955.964	509.376.127.227	512.084.059.552	518.144.105.091	0,93	0,90	0,83	0,97	0,95	0,94		
	a. Belanja Tidak Langsung	387.355.096.204	428.223.697.046	495.359.635.706	445.742.233.280	401.382.440.029	404.337.442.989	360.550.478.529	392.501.729.003	413.543.114.996	437.333.696.142	385.129.948.186	384.291.374.462	0,93	0,92	0,83	0,98	0,96	0,95		
	b. Belanja Langsung	88.327.621.706	70.165.969.069	75.693.004.433	78.312.977.400	140.242.403.295	144.028.419.927	82.531.082.364	55.318.429.641	62.679.840.968	72.042.431.085	126.954.111.366	133.852.730.629	0,93	0,79	0,83	0,92	0,91	0,93		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.196.232.950	5.141.254.450	3.896.286.100	4.182.674.000	3.231.837.000	3.094.551.700	4.672.611.933	4.672.759.549	3.298.294.750	3.664.806.999	2.570.559.531	2.115.993.820	0,90	0,91	0,85	0,88	0,80	0,68		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	120.431.500	117.879.500	80.687.000	72.600.000	84.550.000	93.004.000	75.018.500	81.465.000	25.785.800	55.603.500	51.394.100	61.163.100	0,62	0,69	0,32	0,77	0,61	0,66		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	783.852.000	781.260.000	714.600.000	714.200.000	398.040.000	437.760.000	626.863.783	692.005.299	499.480.450	546.570.649	221.730.607	259.354.241	0,80	#VA LUE!	0,70	0,77	0,56	0,59		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	70.200.000	70.200.000	70.200.000	84.840.000	49.590.000	81.460.000	41.814.400	40.897.000	40.919.800	28.119.500	49.152.699	47.921.292	0,60	0,58	0,58	0,33	0,99	0,59		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	139.395.000	220.695.000	153.902.000	187.422.000	169.233.000	185.607.500	137.319.500	210.387.100	153.257.100	184.138.500	159.203.000	137.166.000	0,99	0,95	1,00	0,98	0,94	0,74		
5	Penyediaan alat tulis kantor	915.451.900	914.101.900	511.850.100	594.972.000	427.000.000	469.496.900	896.651.650	902.059.450	508.865.700	581.480.850	367.503.050	280.897.037	0,98	0,99	0,99	0,98	0,86	0,60		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	962.064.750	924.794.750	727.163.850	827.000.000	671.756.000	504.918.000	948.234.500	908.489.200	685.768.200	790.455.400	624.632.063	296.089.800	0,99	0,98	0,94	0,96	0,93	0,59		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	108.338.300	109.088.300	50.452.650	61.047.000	47.000.000	51.699.300	103.478.450	103.964.300	46.765.200	56.233.100	40.367.300	8.665.000	0,96	0,95	0,93	#VA LUE!	0,86	0,17		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	191.909.000	198.489.000	104.706.000	128.396.000	83.400.000	91.683.000	178.171.500	186.010.000	91.896.500	110.051.500	50.445.000	14.725.750	0,93	0,94	0,88	0,86	0,60	0,16		
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	92.160.000	93.600.000	61.200.000	65.520.000	45.600.000	48.960.000	85.753.000	90.785.000	54.010.000	56.030.000	31.125.000	18.045.000	0,93	0,97	0,88	0,86	0,68	0,37		
10	Penyediaan makanan dan minuman	239.152.500	241.890.000	147.815.000	173.255.000	166.435.000	146.975.000	219.743.000	239.745.000	127.730.500	161.969.000	131.420.712	105.332.100	0,92	#VA LUE!	0,86	0,93	0,79	0,72		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	303.852.000	301.050.000	314.887.500	301.590.000	205.075.000	247.800.000	252.549.150	234.482.200	221.875.500	228.685.000	174.741.000	179.709.500	0,83	0,78	0,70	0,76	0,85	0,73		
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.214.760.000	1.111.980.000	919.680.000	924.000.000	852.000.000	700.000.000	1.079.690.000	953.240.000	834.060.000	852.000.000	664.000.000	696.000.000	0,89	0,86	0,91	0,92	0,78	0,99		
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	54.666.000	56.226.000	39.142.000	47.832.000	32.158.000	35.188.000	27.324.500	29.230.000	7.880.000	13.470.000	4.845.000	10.925.000	0,50	0,52	0,20	0,28	0,15	0,31		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISAI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISAI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.024.734.550	1.889.683.000	2.309.059.500	4.650.749.000	4.043.697.000	1.341.108.400	2.877.505.200	1.848.963.600	2.252.962.500	4.144.727.600	3.895.074.453	1.105.871.454	0,95	0,98	0,98	0,89	0,96	0,82		
14	Pembangunan gedung kantor	1.838.621.550		479.493.000	1.345.638.000	2.063.063.000		1.744.950.700	-	474.000.000	920.293.000	2.037.318.750	-	0,95	#DIV /0!	0,99	0,68	0,99	#DIV /0!		
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	170.760.000		165.350.000	716.719.000			160.680.000	-	165.000.000	716.719.000	-	-	0,94	#DIV /0!	1,00	1,00	#DIV /0!	#DIV /0!		
16	Pengadaan meubelair	84.700.000	73.950.000	78.300.000	50.182.300	75.000.000	147.900.000	83.500.000	71.340.000	77.700.000	49.947.300	74.800.000	147.775.125	0,99	#VA LUE!	0,99	1,00	1,00	1,00		
17	Pengadaan Komputer	63.600.000	223.500.000	231.300.000	97.782.700	50.000.000	250.700.000	59.892.500	211.930.000	229.620.000	97.125.600	48.395.300	227.788.000	0,94	0,95	#VA LUE!	0,99	0,97	0,91		
18	Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	55.600.000	-	314.100.000	14.500.000	-	-	55.100.000	-	302.663.000	14.378.788	#DIV /0!	#DIV /0!	0,99	#DIV /0!	0,96	0,99		
19	Pengadaan alat-alat studio		20.150.000	16.600.000			30.300.000	-	19.950.000	16.400.000	-	-	30.073.200	#DIV /0!	0,99	0,99	#DIV /0!	#DIV /0!	0,99		
20	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air		110.250.000	22.000.000	150.400.000	25.000.000	150.400.000	-	109.440.100	21.700.000	149.720.000	24.950.000	150.264.500	#DIV /0!	0,99	#VA LUE!	1,00	1,00	1,00		
21	Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.920.000	37.100.000	50.300.000	33.807.000	50.000.000	64.400.000	29.500.000	36.800.000	49.840.000	33.340.000	49.415.000	64.030.820	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	201.956.000	201.956.000	244.756.000	295.956.000	431.569.000	349.958.400	196.843.000	199.498.000	243.136.000	273.855.700	395.046.855	326.557.100	0,97	0,99	0,99	0,93	0,92	0,93		
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.800.000	89.600.000	98.600.000	88.779.000	85.300.000	112.750.000	85.607.500	85.675.000	64.262.000	67.600.000	80.083.000	88.932.221	0,82	0,96	0,65	0,76	0,94	0,79		
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	250.972.000	271.972.000	134.020.000	162.120.000	98.000.000	108.000.000	242.813.000	262.852.000	128.331.000	154.801.000	79.709.600	17.871.700	0,97	#VA LUE!	0,96	0,95	0,81	0,17		
25	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	229.405.000	230.905.000	138.240.500	166.840.500	102.200.000	112.200.000	223.768.500	226.549.500	137.573.500	149.369.500	56.240.448	38.200.000	0,98	0,98	1,00	0,90	0,55	0,34		
26	Penyediaan Sarana Gedung	30.000.000	30.000.000			-	-	30.000.000	30.000.000		-	-	-	1,00	1,00	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		
27	Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor		600.300.000	594.500.000	1.542.524.500	749.465.000	-		594.929.000	590.300.000	1.531.956.500	746.452.500	-	#DIV /0!	0,99	0,99	0,99	1,00	#DIV /0!		
28	Pembangunan Website	20.000.000				-	-	19.950.000	-					1,00	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	821.050.000			2.045.100.000	-	-	794.639.750	-		1.915.348.000	-	-	0,97	#DIV /0!	#DIV /0!	0,94	#DIV /0!	#DIV /0!		
29	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				2.045.100.000	-	-				1.915.348.000	-	-	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,94	#DIV /0!	#DIV /0!		
30	Pengadaan pakaian KORPRI	797.250.000				-	-	770.883.750	-					0,97	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		
31	Pengadaan Pakaian senam	23.800.000				-	-	23.756.000	-					1,00	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.520.000	83.600.000	109.950.000	88.500.000	56.000.000	75.000.000	39.672.900	32.775.000	23.835.000	14.900.000	40.879.000	34.448.291	0,49	0,39	0,22	0,17	0,73	0,46		
32	Pendidikan dan pelatihan formal	80.520.000	83.600.000	109.950.000	88.500.000	56.000.000	75.000.000	39.672.900	32.775.000	23.835.000	14.900.000	40.879.000	34.448.291	0,49	0,39	0,22	0,17	0,73	0,46		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	134.254.420	95.768.920	105.078.000	151.286.000	121.780.000	177.029.900	107.694.500	82.461.500	90.949.650	131.872.750	110.505.600	137.515.500	0,80	0,86	0,87	0,87	0,91	0,78		
33	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.600.860	6.429.000	7.500.000	14.925.000	15.300.000	25.000.000	8.597.500	6.423.000	7.311.000	14.773.000	14.790.000	24.908.200	1,00	1,00	0,97	0,99	0,97	1,00		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISIAISI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISIASI
34	Penyusunan laporan keuangan semesteran	15.047.000	7.666.000	7.500.000	17.671.000	11.560.000	19.910.000	14.678.000	7.068.000	7.096.000	13.338.000	10.275.500	18.859.100	0,98	0,92	0,95	0,75	0,89	0,95		
35	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.660.000	9.996.000	12.534.000	28.662.000	19.425.000	28.975.000	18.057.000	9.592.500	12.504.000	19.876.000	16.908.800	16.650.000	0,97	0,96	1,00	0,69	0,87	0,57		
36	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	21.026.560	19.999.920	20.000.000	20.000.000	15.000.000	24.999.900	20.820.000	18.561.500	19.949.900	19.997.750	14.482.500	24.406.200	0,99	0,93	1,00	1,00	0,97	0,98		
37	Penyusunan Daftar Gaji	70.920.000	51.678.000	57.544.000	70.028.000	60.495.000	78.145.000	45.542.000	40.816.500	44.088.750	63.888.000	54.048.800	52.692.000	0,64	0,79	0,77	0,91	0,89	0,67		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.426.108.003	3.414.430.000	3.808.045.800	5.591.881.600	6.253.328.000	6.766.248.650	3.340.456.600	3.397.155.250	3.688.619.300	5.485.263.850	5.943.693.291	6.587.566.258	0,98	0,99	0,97	0,98	0,95	0,97		
38	Pembangunan gedung sekolah			359.850.000	1.302.400.000	2.041.303.750	2.674.226.050		-	357.237.000	1.298.062.000	2.032.879.750	2.658.610.050	#DIV /0!	#DIV /0!	0,99	1,00	1,00	0,99		
39	Pembangunan ruang kelas sekolah	1.465.820.000	1.903.740.000	1.581.992.000	2.525.395.000	611.500.000	1.122.950.000	1.462.349.000	1.902.227.000	1.572.981.000	2.517.652.750	608.781.500	1.121.711.600	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00		
40	Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	321.798.000,00			150.100.000	1.300.000.000	667.805.000	319.325.000	-		147.149.000	1.291.476.000	665.670.168	#VA LUE!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,98	0,99	1,00		
41	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa					50.000.000	52.720.000		-		48.440.000	51.647.200	51.647.200	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,97	0,98		
42	Pengadaan mebeluer sekolah	103.275.003	95.315.000	225.100.000	200.480.000	599.838.750	181.639.500	91.125.000	95.030.000	209.128.000	197.744.500	448.922.250	178.761.400	0,88	1,00	0,93	0,99	0,75	0,98		
43	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	11.000.000	63.500.000	17.000.000	21.775.000	26.775.000	29.775.000	11.000.000	63.315.000	16.990.000	26.775.000	29.775.000	29.775.000	1,00	1,00	1,00	#VA LUE!	1,00	1,00		
44	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	253.000.000		603.500.000	1.055.000.000	500.000.000	784.636.000	205.627.500	-	538.413.000	1.047.074.000	493.517.250	783.418.000	0,81	#DIV /0!	0,89	0,99	0,99	1,00		
45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah					282.300.000	299.230.000		-		271.636.000	298.650.800	298.650.800	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,96	1,00		
46	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	86.215.000			145.866.000	492.769.000	498.489.000	79.715.000	-		129.956.000	420.081.400	474.507.425	0,92	#DIV /0!	#DIV /0!	0,89	0,85	0,95		
47	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	1.185.000.000	1.315.100.000	941.558.800	54.010.600	98.841.500	131.250.000	1.171.315.100	1.309.771.000	924.809.800	40.875.600	86.915.850	84.060.300	0,99	1,00	#VA LUE!	0,76	0,88	0,64		
48	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini					150.000.000	152.999.400		-			128.716.385	139.204.250	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,86	0,91		
49	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini		36.775.000	79.045.000	136.855.000	75.000.000	102.990.000		26.812.250	69.060.500	85.055.000	68.546.000	82.662.465	#DIV /0!	0,73	0,87	0,62	0,91	0,80		
50	Fasilitas izin operasional PAUD					25.000.000	67.538.700		-			17.005.906	18.887.600	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,68	0,28		
0	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	54.536.976.625	31.815.207.703	37.512.798.833	39.717.281.530	88.449.555.644	82.389.405.756	52.516.010.433	22.956.567.138	34.371.173.828	37.450.608.711	79.525.729.857	77.389.976.759	0,96	0,72	0,92	0,94	0,90	0,94		
51	Pembangunan gedung sekolah	900.000.000		2.614.000.000		-	-	-	-	2.508.397.500		-	-	0,00	#DIV /0!	0,96	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	
52	Penambahan ruang kelas sekolah	2.667.783.350	3.193.798.159	4.418.900.230	6.641.894.000	3.271.650.000	7.292.569.000	2.663.448.000	3.191.515.268	4.413.946.230	6.600.673.000	3.225.061.000	6.266.037.400	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,86		
53	Pembangunan ruang lab siswa		995.715.000	741.238.540	1.076.710.000	-	-		993.994.000	733.458.540	1.052.696.000		-	#DIV /0!	1,00	#VA LUE!	0,98	#DIV /0!	#DIV /0!		
54	Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	956.000.000	999.290.000	1.700.000.000	2.868.911.000	500.000.000	1.287.932.000	951.533.000	996.894.000	1.347.936.500	2.717.657.300	496.283.250	1.287.222.000	#VA LUE!	1,00	0,79	0,95	0,99	1,00		
55	Pembangunan perpustakaan sekolah	8.361.074.000	668.127.768	1.860.931.398	2.672.614.000	-	-	8.355.930.388	666.722.772	1.853.101.398	2.649.074.000		-	1,00	1,00	1,00	0,99	#DIV /0!	#DIV /0!		
56	Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	610.896.200	6.219.299.000	412.360.000	2.511.024.000	6.025.260.000	2.021.835.000	577.617.500	1.118.044.780	402.167.200	2.475.768.700		1.985.046.000	0,95	0,18	0,98	0,99	0,00	0,98		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISAI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISAI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
57	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	13.290.517.600	5.830.780.000	4.075.730.000	2.404.888.000		-	12.593.605.345	3.980.222.525	3.218.590.500	1.429.800.000	-	-	0,95	0,68	0,79	0,59	#DIV/0!	#DIV/0!		
58	Pengadaan mebeluer sekolah	1.275.299.500	481.593.250	882.917.000	2.872.110.000	187.005.000	581.488.000	1.273.532.000	477.325.750	876.581.000	2.765.497.500	186.165.000	496.488.000	1,00	0,99	0,99	0,96	1,00	0,85		
59	Pengadaan perlengkapan sekolah				7.532.999.800		-				7.509.939.721	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
60	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	282.738.500	282.738.500	282.738.500			-	282.344.000	282.374.500	-		-	-	1,00	1,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
61	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	435.000.000			2.677.313.680		-	433.960.000			2.572.108.430	-	-	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	#DIV/0!	#DIV/0!		
62	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	19.161.147.000	4.629.573.556	9.931.982.595	2.829.433.750	16.681.929.600	13.096.858.500	19.146.113.400	4.613.225.843	9.870.811.380	2.733.492.660	16.661.419.300	13.090.335.550	1,00	1,00	0,99	0,97	1,00	1,00		
63	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah			1.170.870.420			-			1.154.703.530		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
64	Rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah					105.000.000						-	104.895.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00		
65	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	140.000.000	181.340.000	257.292.500	149.130.000	59.354.500	56.931.000	64.806.000	98.134.500	127.314.500	120.907.500	44.292.100	49.363.646	0,46	0,54	0,49	0,81	0,75	0,87		
66	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum	220.215.000	678.240.000	1.073.000.000	598.200.900	104.551.300	104.551.300	215.044.800	28.000.000	632.675.000	576.532.200	101.797.150	103.486.450	0,98	0,04	0,59	0,96	0,97	0,99		
67	Pembinaan SMP terbuka	52.302.500	19.550.000	29.725.000			-	5.865.000	15.295.000	20.885.500		-	-	0,11	0,78	0,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
68	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)					59.196.558.644	55.630.504.156				56.531.518.897		52.104.222.476	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	0,94		
69	Penyediaan Biaya operasional Pemantauan Pelaksanaan BPPDGS	80.000.000	119.625.000	139.625.000	138.044.900	189.625.000	139.625.000	77.409.500	113.595.000	138.425.000	137.899.900	189.575.000	89.925.864	0,97	0,95	0,99	1,00	1,00	0,64		
70	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	441.035.000,00	774.460.000	610.155.500	685.899.250	803.648.500	803.648.500	378.370.000	503.980.000	489.425.000	584.510.000	775.342.500	704.482.560	#VA LUE!	0,65	0,80	0,85	0,96	0,88		
71	Penyelenggaraan paket A setara SD	400.000.000	461.850.000	754.172.000	128.740.000	167.800.000	-	396.256.000	443.850.000	703.340.000	120.280.000	144.268.960	-	0,99	#VA LUE!	0,93	0,93	0,86	#DIV/0!		
72	Penyelenggaraan paket B setara SMP	1.400.000.000	1.428.765.000	2.129.566.000	164.390.000	-	-	1.396.400.000	1.415.330.000	1.969.518.500	147.131.000	-	-	1,00	0,99	0,92	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!		
73	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar		66.603.870	80.000.000	69.421.750	37.778.500	149.716.000		58.215.000	76.500.000	65.384.650	34.502.500	134.301.330	#DIV/0!	0,87	0,96	0,94	0,91	0,90		
74	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	184.115.000	671.016.000	548.904.000	703.067.000	161.878.600	140.618.000	167.405.000	298.971.000	463.917.500	625.684.250	112.315.100	120.594.020	0,91	0,45	0,85	0,89	0,69	0,86		
75	Pelaksanaan UAN SMP	1.850.600.000	2.340.800.000	2.107.900.000	2.105.567.750	718.920.000	708.941.300	1.755.858.650	1.997.158.000	1.770.033.900	1.865.988.000	691.864.100	666.532.408	0,95	0,85	0,84	0,89	0,96	0,94		
76	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	942.100.000	939.435.600	939.435.600		-		937.860.500	937.135.600	933.885.600		-	-	1,00	1,00	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
77	Koordinasi dan Penguatan UKS	112.950.000	305.230.000	171.735.000	255.204.500	119.787.000	97.879.000	85.650.000	273.400.000	139.658.000	199.140.800	114.986.000	82.582.515	0,76	0,90	0,81	0,78	0,96	0,84		
78	Fasilitasi penyelenggaraan Program-Program Pendidikan		96.210.000	95.010.000	85.920.750	-			82.145.000	68.810.000	70.120.750	-	-	#DIV/0!	0,85	0,72	0,82	#DIV/0!	#DIV/0!		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISIAISI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISIASI	
79	Pekan Seni Pelajar SD dan SMP	157.666.800	171.265.000	213.000.000	267.583.950	123.809.000	121.309.000	148.150.800	144.136.000	210.682.000	180.773.800	122.189.000	93.395.360	0,94	0,84	0,99	0,68	0,99	0,77			
80	Manajemen operasional BOS	148.700.000			125.000.000	-	-	142.834.500			125.000.000	-	-	0,96	#DIV /0!	#DIV /0!	1,00	#DIV /0!	#DIV /0!			
81	Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta		125.000.000	125.000.000		-	-		116.460.000	124.310.000		-	-	#DIV /0!	0,93	0,99	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
82	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		125.000.000	146.609.550	153.212.550	100.000.000	50.000.000		116.460.000	122.099.550	124.548.550	94.150.000	11.066.180	#DIV /0!	0,93	0,83	0,81	0,94	0,22			
83	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Lain	466.836.175				-	-	466.016.050					-	1,00	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
	Program Pendidikan Menengah	18.339.721.658	23.024.280.696	21.640.229.000	15.724.826.020	29.799.931.076	41.404.465.521	15.736.277.947,50	18.003.212.854	17.500.433.840	15.009.917.200	27.864.453.630	38.660.024.302	0,86	0,78	0,81	0,95	0,94	0,93			
84	Pembangunan gedung sekolah	4.280.000.000	11.395.391.000	6.496.263.000	580.605.000	-		2.415.210.000	10.568.053.100	4.119.624.100	508.258.200		-	0,56	0,93	0,63	0,88	#DIV /0!	#DIV /0!			
85	Penambahan ruang kelas sekolah (SMA/MA/SMK)	1.668.000.000	703.269.456	2.069.459.000	3.667.035.000	2.755.165.000	2.811.687.000	1.615.020.000	701.094.964	2.051.946.000	3.347.222.000	2.686.952.000	2.767.111.300	0,97	#VA LUE!	0,99	0,91	0,98	0,98			
86	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	1.321.666.083	249.804.800	1.128.066.000	1.970.718.000	1.678.182.500	8.916.443.000	1.319.852.482,50	245.227.400	1.122.408.000	1.944.452.000	1.596.737.000	8.907.905.200	1,00	0,98	0,99	0,99	0,95	1,00			
87	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir		960.200.000	1.114.000.000	2.678.325.000	688.395.000	1.149.130.000		953.860.000	1.074.183.000	2.637.407.000	666.721.000	940.953.000	#DIV /0!	0,99	0,96	0,98	0,97	0,82			
88	Pembangunan perpustakaan sekolah	845.997.500		470.999.500	1.648.815.000	988.256.000	4.528.604.000	844.207.600		464.736.000	1.612.157.000	950.264.200	4.227.337.350	1,00	#DIV /0!	0,99	0,98	0,96	0,93			
89	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	747.870.000	1.920.920.000	210.160.000		-	-	726.648.200	249.226.900	199.715.000		-	-	0,97	0,13	0,95	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
90	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.981.470.000	3.031.470.000	3.710.830.000		3.465.260.000	1.054.044.800	1.881.158.800	968.360.000	2.900.179.940		3.408.658.500	549.460.900	0,95	0,32	0,78	#DIV /0!	#DIV /0!	0,98	0,52		
91	Pengadaan mebeluer sekolah	691.250.400,00	440.176.950	677.581.000	1.461.244.320	567.430.000	2.095.270.000	489.700.000	438.479.800	470.977.000	1.446.594.700	495.260.900	1.957.551.400	#VA LUE!	1,00	0,70	0,99	0,87	0,93			
92	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	181.270.000	183.870.000	199.874.000	241.844.000		-	170.364.500	172.397.500	199.222.500	235.700.500	-	-	0,94	0,94	1,00	#VA LUE!	#DIV /0!	#DIV /0!			
93	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	500.000.000					-	486.249.000					-	0,97	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
94	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.998.143.500	1.154.736.490	1.301.995.000	1.235.367.500	1.704.702.500	3.628.457.000	1.984.816.500	1.143.322.690	1.272.755.500	1.220.137.500	1.570.276.500	3.453.052.700	0,99	0,99	0,98	0,99	0,92	0,95			
96	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	-	-	-	-	700.721.000	438.626.200			679.198.000		428.593.000		#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		0,97	0,98		
96	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik		192.009.000			155.052.500	155.052.500		-		96.708.000		55.634.680	#DIV /0!	0,00	#DIV /0!	#DIV /0!		0,62	0,36		
97	pelatihan dan pengembangan kurikulum	-	-	-	-	145.448.700	142.388.700				100.047.500		137.684.700	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		0,69	0,97		
98	Pembiayaan SMP terbuka	-	-	-	-	19.400.000	19.400.000						-	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		0,00	0,00		
99	Penyediaan dana pengembangan sekolah satu atap	-	-	-	-	66.961.800	66.451.800				58.882.500		62.125.000	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		0,88	0,93		
100	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	425.000.000	357.500.000	712.960.000	408.002.500	-	-	188.097.100	213.828.500	321.501.500	322.341.400		-	0,44	0,60	#VA LUE!	0,79	#DIV /0!	#DIV /0!			

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISAI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISAI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
101	Penyelenggaraan paket C setara SMU	1.260.000.000	1.465.625.000	1.973.411.000	117.400.000	221.500.000	-	1.255.138.000	1.461.951.500	1.895.086.000	111.415.000	194.516.000	-	1,00	1,00	0,96	0,95	0,88	#DIV/0!		
102	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)		55.002.500	65.000.000	61.008.600	54.838.000	181.082.000		54.002.500	65.000.000	61.008.600	36.799.000	119.153.000	#DIV/0!	0,98	1,00	1,00	0,67	0,66		
103	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	-	-	-	-	711.099.000	583.600.000					387.344.000	533.392.925	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,54	0,91		
104	Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)	-	-	-	-	73.650.000	58.650.000					73.650.000	52.451.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,89		
105	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	86.877.500	199.670.500	560.483.000	553.955.000		-	79.377.500	194.810.500	434.184.300	501.818.000		-	0,91	0,98	0,77	0,91	#DIV/0!	#DIV/0!		
106	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	99.600.000	74.750.000	98.000.000	99.403.900	97.000.000	-	99.270.000	74.750.000	98.000.000	99.403.900	96.512.185	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	#DIV/0!		
107	Pelaksanaan Ujian Nasional	369.000.000	546.690.000	670.102.500	775.624.400	933.897.000	1.386.209.200	325.609.090	483.827.000	638.829.500	742.857.000	707.849.406	1.143.000.000	0,88	0,89	0,95	0,96	0,76	0,82		
108	Koordinasi dan Penguatan UKS	-	-	-	-	130.413.000	130.413.000					59.076.000	68.401.320	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,45	0,52		
109	Penyediaan Bantuan Biaya Minimal Pendidikan SMA/MA/MK	50.000.000		48.800.000	48.781.550		-	34.607.500		41.246.000	46.250.000		-	0,69	#DIV/0!	#VA LUE!	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!		
110	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.736.280.000				14.516.368.076	13.936.430.321	1.736.280.000				13.873.144.939	13.162.628.027	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96	0,94		
112	Pekan Seni Pelajar SMA	97.296.675	93.195.000	132.245.000	101.596.250	126.191.000	122.526.000	84.671.675	80.020.500	130.839.500	97.794.400	125.856.000	93.588.800	0,87	0,86	0,99	0,96	1,00	0,76		
113	Revitalisasi MGMP				75.100.000						75.100.000		-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Pendidikan Non Formal	1.637.500.000	3.488.530.000	3.488.530.000	866.350.150	696.500.000	1.643.232.000	1.514.987.000	3.370.700.000		730.601.950	552.713.938	1.430.765.325	0,93	0,97	0,00	0,84	0,79	0,87		
114	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal dan informal	-	-	-	-	96.750.000	154.545.000				79.456.500		143.256.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,82	0,93		
115	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	50.000.000	52.955.000	154.031.000	102.888.250	412.750.000	106.283.000	49.575.000	52.855.000	148.226.000	96.083.250	338.837.800	103.354.000	0,99	1,00	0,96	0,93	0,82	0,97		
116	Pengembangan pendidikan keaksaraan	1.480.000.000	52.955.000	2.863.151.000	577.366.200	-	312.814.000	1.364.692.000	52.855.000	2.856.961.000	476.253.000	0	240.529.000	0,92	1,00	1,00	0,82	#DIV/0!	0,77		
117	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal dan informal	-	-	-	-	-	332.600.000					-	318.392.400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,96		
118	Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional	107.500.000	130.125.000	191.497.500	186.095.700	160.000.000	174.625.000	100.720.000	129.795.000	186.425.900	158.265.700	109.122.888	117.683.000	0,94	1,00	0,97	0,85	0,68	0,67		
119	Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C	-	-	-	-	-	562.365.000						507.550.925	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,90		
120	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		28.400.000	30.053.000		27.000.000	-		27.980.000	29.003.000		25.296.750	-	#DIV/0!	0,99	0,97	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!		
	Program Pendidikan Luar Biasa		93.610.000	135.112.500	93.015.000	-	-		43.935.000	44.572.500	30.820.500	-	-	#DIV/0!	0,47	0,33	0,33	#DIV/0!	#DIV/0!		
121	Pekan seni pelajar dan Kreatifitas siswa SLB		93.610.000	135.112.500	93.015.000	-	-		43.935.000	44.572.500	30.820.500	-	-	#DIV/0!	0,47	0,33	0,33	#DIV/0!	#DIV/0!		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISIAISI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISIAISI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISIASI	
122	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	611.077.250	691.030.750	884.172.500	2.373.409.250	5.810.430.000	6.659.734.000	501.839.250	518.691.750	500.981.900	1.762.805.250	5.259.555.450	6.006.542.480	0,82	0,75	0,57	0,74	0,91	0,90			
123	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	98.600.000	98.495.000	89.000.000	-	-	-	95.340.000	76.049.000	-	-	-	-	0,97	0,77	0,00	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
124	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan				1.450.500.000	5.000.000.000	5.292.025.000				979.288.500	4.778.550.000	5.130.020.000	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		0,68	0,96	0,97		
125	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	34.800.000	49.182.500	46.200.000	-	-	-	30.170.000	41.682.500	-	-	-	-	0,87	0,85	0,00	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
126	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	262.677.500	319.068.250	363.943.250	444.868.250	298.650.000	187.452.000	241.212.500	264.759.250	321.707.750	328.768.250	20.000.000	170.086.475	0,92	0,83	#VA LUE!	0,74	0,07	0,91			
127	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan	55.000.000	46.897.000	61.535.000		31.490.000	72.610.000	-	-	49.780.000		-	52.199.440	0,00	0,00	#VA LUE!	#DIV /0!	0,00	0,72			
128	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	49.999.750	56.638.000	74.400.000	70.290.000	70.290.000	137.206.000	43.744.750	42.523.000	47.720.000	53.530.000	52.439.950	109.495.500	0,87	0,75	0,64	0,76	0,75	0,80			
129	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	110.000.000	120.750.000	127.665.750			195.260.000	91.372.000	93.678.000	81.774.150		-	180.972.665	0,83	0,78	0,64	#DIV /0!	#DIV /0!	0,93			
130	Penilaian Kompetensi Kepala sekolah dan Calon Kepala sekolah			121.428.500	407.751.000	410.000.000	775.181.000				-	401.218.500	408.565.500	363.768.400	#DIV /0!	#DIV /0!	#VA LUE!	0,98	1,00	0,47		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	519.446.250	522.183.550	1.938.854.700	2.920.919.850	1.779.344.575	477.644.000	429.386.850	435.143.000	952.590.200,000	1.731.578.775	1.190.946.617	384.026.440	0,83	0,83	0,49	0,59	0,67	0,80			
131	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	82.400.000	78.042.800	100.000.000	99.219.300	120.000.000	-	82.400.000	76.042.800	100.000.000	99.219.300	119.152.397	-	1,00	0,97	1,00	1,00	0,99	#DIV /0!			
132	Pembinaan dewan pendidikan	96.800.000	100.000.000	53.000.000	-	-	-	78.892.500	61.358.000	48.800.000			-	0,82	0,61	0,92	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
133	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	126.831.250	98.920.500	222.978.450	202.941.900	250.000.000	337.644.000	84.893.950	90.462.200	218.735.850	173.524.900	233.995.630	259.597.115	0,67	0,91	0,98	0,86	0,94	0,77			
134	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26.370.000			-	211.885.000	75.000.000	25.599.500				123.801.250	59.856.000	0,97	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,58	0,80			
135	Fasilitasi Program Decentralized Basic education (DBE)				198.600.000	-					173.830.000		-	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	0,88	#DIV /0!	#DIV /0!			
136	Fasilitasi Program Decentralized Basic education (BEC-TF)	150.000.000	190.885.250	138.502.500	-	-	-	121.355.900	154.120.000	123.250.500			-	0,81	0,81	0,89	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!			
137	Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan	37.045.000	54.335.000	54.230.000	55.050.000	59.500.000	65.000.000	36.245.000	53.160.000	49.555.500	54.775.500	51.843.500	64.573.325	0,98	0,98	0,91	1,00	0,87	0,99			
138	Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan			1.370.143.750	2.365.108.650	1.137.959.575					412.248.350	1.230.229.075	662.153.840	#DIV /0!	#DIV /0!	0,30	0,52	0,58	#DIV /0!			

Keterangan : Mulai tahun 2017 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menjadi Program Pembinaan Sekolah Dasar sehingga output pada kegiatan menjadi Sekolah Dasar (SD), dan Program Pendidikan Menengah menjadi Program Pembinaan sekolah Menengah Pertama demikian juga output kegiatan menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2018 terdiri dari 10 program 94 kegiatan dengan total anggaran sebesar RP. 548.365.862.916,- (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar RP. 404.337.442.989,- dan belanja langsung sebesar Rp. 144.028.419.927,- dengan total realisasi sebesar Rp. 518.144.105.091,- (Lima Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) sebesar 94,49% (dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 384.291.374.462,- dan belanja langsung sebesar Rp. 133.852.730.629,-).

Alokasi Anggaran untuk Dinas Pendidikan dari tahun 2013–2018 cenderung stabil dan agak berfluktuasi, Sedangkan tingkat rasio realisasi anggaran dengan pagu anggaran untuk belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 0,93, tahun 2014 sebesar 0,98, tahun 2015 sebesar 0,83, tahun 2016 sebesar 0,97 dan tahun 2017 sebesar 0,95 serta tahun 2018 sebesar 0,94.

Ada yang perlu mendapat perhatian pada tabel di atas bahwa mulai tahun 2017, Program Wajar dikdas 9 taun berubah menjadi Program Pembinaan Sekolah Dasar sehingga yang semula output kegiatan SD dan SMP menjadi hanya SD saja. Demikian pula program Pendidikan Menengah berubah menjadi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sehingga output kegiatan yang semula SMA/SMK menjadi SMP.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sampang tidaklah sendirian, kita juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan telaahan terhadap hal tersebut di atas ada beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yaitu:

No	Tantangan	Peluang
1	Angka kemiskinan penduduk Kabupaten Sampang masih tinggi sehingga menurunkan tingkat prioritas untuk memperoleh pendidikan	Kebijakan pemerintah pusat tentang pemberian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah mulai tahun 2005;
2	Masih adanya penduduk 15 tahun keatas yang buta aksara, yang penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan kendalanya juga masih cukup besar yaitu permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat	Adanya aturan tentang Anggaran untuk sektor pendidikan minimal 20 % sehingga anggaran pendidikan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan anggaran pemerintah
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD masih rendah sehingga memerlukan percepatan untuk mencapai kondisi yang ideal, sehingga membutuhkan sumber daya yang besar utamanya pendanaan	Rencana kebijakan pemerintah tentang program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD
4	Masih rendahnya tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Sampang, utamanya sektor pendidikan	Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (Inpres No. 5 tahun 2006) sehingga anggaran cukup tersedia
5	Masih banyaknya penduduk Kabupaten Sampang 15 tahun keatas yang tidak tamat SD	Kebijakan daerah tentang Gerakan Wajib Belajar Paket A melalui Peraturan Bupati

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Aksesibilitas Pendidikan, dimana masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang khususnya Indeks Pendidikan;
2. Masih rendahnya Kualitas Pendidikan yang ditandai dengan rendahnya Nilai rata-rata USBN untuk SD dan nilai rata-rata UN SMP yang masih dibawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Selain itu faktor kualitas dan kuantitas guru juga masih sangat rendah serta sarana dan prasarana belum terpenuhi secara memadai.

Berdasarkan data-data pada bab sebelumnya penyebab dari 2 permasalahan yang sifatnya makro tersebut di atas karena permasalahan antara lain:

1) 42,13% Penduduk Kabupaten Sampang Tidak Tamat SD/MI

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sampang masih mencapai 11,76 tahun, masih jauh jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 12,85 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah masih mencapai 4,35 tahun sangat jauh dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 8,10 tahun.

Rendah HLS dan RLS ini disebabkan karena kesadaran akan pentingnya pendidikan masih kurang terutama dimasa yang lalu, sehingga menyebabkan masih banyaknya penduduk Kabupaten Sampang yang berusia di atas 15 tahun yang tidak tamat SD/MI yaitu sebesar 42,13% atau sebesar 358.105 orang.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu indikator yang menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang Pendidikan atau Indeks Pendidikan.

2) Belum Tuntasnya Buta Aksara

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2018 sebanyak 613.878 orang, yang bisa membaca dan menulis sebanyak 567.398 orang, jadi yang menyandang buta aksara sebanyak 46.480 orang (7.57%). Dari data tersebut angka melek huruf Kabupaten Sampang sebesar 92,43%.

Sementara itu, garapan buta aksara untuk kelompok usia 15-44 Tahun sudah tuntas pada Tahun sebelumnya. Artinya, untuk kelompok umur tersebut sudah tidak ada lagi penduduk buta aksara

Untuk kelompok penduduk usia 45 keatas, yang belum digarap melalui program Keaksaraan Fungsional tingkat dasar. Diperlukan berbagai upaya untuk menuntaskan garapan di kelompok usia ini, mengingat sebagian dari mereka adalah kelompok lanjut usia yang sudah enggan untuk mengikuti Keaksaraan Fungsional

3) Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN)

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 61,63 masih dibawah capaian rata-rata Provinsi sebesar 65,37. Sedangkan rata-rata Nilai Ujian Nasional jenjang SMP/MTs sebesar 40,67 jauh dibawah capaian rata-rata Provinsi dengan nilai sebesar 52,96.

Rendahnya nilai USBN dan UN tersebut disebabkan karena adanya regulasi baru yang dibuat Kemendikbud seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa SMP/MTs dan soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Disamping itu kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta kurangnya jumlah guru PNS dan kapasitas guru ikut mempengaruhi hasil tersebut.

Nilai USBN dan UN sebagai indikator mutu utamanya lulusan sehingga mempengaruhi proses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

4) Kapasitas dan Kinerja Guru

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mensyaratkan guru dari TK hingga SMA/SMK harus memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. Meskipun di Kabupaten Sampang masih ada yang kurang memenuhi namun tidak terlalu banyak.

Berdasarkan kualifikasi tidak terlalu bermasalah namun dari segi Kapasitas masih rendah dengan indikator Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil Uji Kompetensi terakhir nilai UKG sebesar 56,50 masih dibawah capaian rata-rata provinsi sebesar 61,89 sehingga diperlukan program pengembangan kapasitas.

Kondisi ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas para guru-guru agar memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan tugasnya.

5) Kekurangan Guru

Kecukupan guru merupakan, salah satu dukungan utama terhadap proses pembelajaran yang efektif. Disatu sisi, rasio guru terhadap rombel yang rendah dapat menjadi kendala dalam proses pembelajaran sehingga tidak efektif. Sementara disisi lain rasio guru terhadap rombel yang tinggi menyebabkan adanya guru kelas yang mempunyai jam mengajar di bawah standar. Berikut diuraikan gambaran mengenai rasio guru terhadap rombongan belajar pada masing-masing jenjang pendidikan.

Gambaran kasar dengan membandingkan jumlah guru PNS dan kebutuhan guru menunjukkan bahwa jumlah guru kelas SD negeri pada Tahun 2018 tidak mencukupi. Jumlah guru SD yang bersetatus sebagai PNS sebanyak 2.410 orang, sedangkan kebutuhan guru berdasarkan rombel yang ada sebanyak 4.427 orang. Secara keseluruhan terdapat kekurangan guru PNS sebesar 2.017 guru.

KEBUTUHAN GURU SD PER DESEMBER 2018

NO	JENIS JABATAN	KEBUTUHAN GURU	JUMLAH GURU PNS	KEKURANGAN GURU	GTT	KET
1	2		3		5	4
2	Guru kelas	3.376	1.864	1.512	1.588	
3	Guru Agama	528	309	219	132	
4	Guru Penjaskes	523	237	286	175	
	JUMLAH	4.427	2.410	2.017	1.895	

Rasio guru mata pelajaran terhadap rombel pada jenjang SMP/MTs untuk masing-masing pelajaran berbeda-beda, tergantung dari jumlah jam semester (js) dari mata pelajaran. Mata pelajaran dengan jumlah jam 2, rasio ideal antara guru dengan rombel adalah 1:12, artinya 1 orang guru memerlukan jam mengajar di 12 rombel. Sedangkan mata pelajaran dengan jumlah jam 4, rasio idealnya adalah 1:6, artinya 1 orang guru memerlukan jam mengajar di 6 rombel. Apabila rasio itu terpenuhi, maka guru mata pelajaran yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban mengajar sebanyak 24 jam per minggu. Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut adalah gambaran jumlah guru ideal yang diperlukan untuk masing-masing matapelajaran dan identifikasi kecukupan guru untuk masing-masing mata pelajaran di SMP Negeri Kabupaten Sampang.

Jumlah kebutuhan guru SMP Negeri Kabupaten Sampang pada Tahun 2018 adalah 687 orang sedangkan jumlah guru PNS yang ada sebanyak 515 orang, untuk semua mata pelajaran terdapat kekurangan guru SMP negeri, dengan jumlah sebesar 172 guru untuk berbagai mata pelajaran.

KEBUTUHAN GURU SMP PER DESEMBER 2018					
NO	JENIS JABATAN	KEBUTUHAN GURU	GURU PNS YANG ADA	KEKURANGAN GURU	KET
1	Pendidikan Agama	47	40	7	

2	PKn	47	47	0	
3	Bahasa Indonesia	87	58	29	
4	Bahasa Inggris	66	56	10	
5	Matematika	78	64	14	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	79	77	2	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	66	73	-7	
8	Seni Budaya	43	22	21	
9	Penjaskes	44	30	14	
10	Prakarya/Ketrampilan	29	12	17	
11	Bahasa Madura	33	7	26	
12	Bimbingan Konseling	68	29	39	
JUMLAH		687	515	172	

6). Terbatasnya sarana dan prasarana

Mutu input pendidikan digambarkan melalui kecukupan ruang kelas; kelayakan ruang kelas dan kecukupan jumlah guru untuk keseluruhan lembaga SD/MI. Dari sisi kecukupan jumlah ruang kelas, rasio ruang kelas SD/MI terhadap rombongan belajar secara umum sudah cukup memadai. Namun apabila dihitung secara keseluruhan Rombongan Belajar yang ada sebanyak 8.441 rombongan belajar, sedangkan Ruang kelas yang ada sebanyak 6.540 RK. Sehingga kekurangan Ruang kelas sebanyak 1.901 RK. Berdasarkan kelayakan ruang kelas, secara keseluruhan baru terdapat 78 % ruang kelas dalam kondisi baik, selebihnya ruang kelas yang ada dalam kondisi rusak berat (5%), dan rusak total (7%).

Kondisi di atas menggambarkan bahwa banyak ruang kelas di SD/MI dalam kondisi tidak layak, bahkan 13 % dalam kondisi dapat membahayakan keselamatan murid dan guru. Kurang optimalnya manajemen aset di Dinas Pendidikan dan terbatasnya dana pemeliharaan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kerusakan ruang kelas.

Terkait dengan sumber belajar, perpustakaan semestinya memegang peran penting, tetapi jumlah SD/MI yang memiliki perpustakaan masih sangat terbatas. bahwa ketersediaan Perpustakaan di SD/MI pada tahun 2018 baru mencapai 71,29%, tersebar di 406 SD,

dan 376 MI. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian SD/MI (28,71%) belum memiliki perpustakaan.

Data Prasarana Tahun 2018/2019

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Sekolah	1.097	481	
2	Rombongan Belajar	8.441	2.070	
3	Ruang Kelas	6.540	1.969	
4	Perpustakaan	782	166	
5	Ruang UKS	219	127	
6	Tempat Olahraga	0	0	
7	Laboratorium	2	106	

Pada Tahun 2018, jumlah siswa SMP/MTs mencapai sebesar 56.338 siswa tersebar di 481 lembaga, dengan rombel berjumlah 2.070, maka rasio jumlah siswa terhadap rombel SMP/MTs sebesar 1/27,21, sedangkan ruang kelas yang ada sebanyak 1.969 RK secara keseluruhan kekurangan ruang kelas sebanyak 101 RK.

Kekurangan dan kelebihan Prasarana Tahun 2018/2019

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Ruang Kelas	1.901	101	
2	Perpustakaan	315	315	
3	Ruang UKS	878	354	
4	Tempat Olahraga	1.097	481	
5	Laboratorium	1.095	375	

Dari kelayakan ruang kelas, sebagian besar (90,25%) ruang kelas dalam kondisi baik. Selebihnya, dalam kondisi rusak sedang sebanyak 150 (7,62%), dan rusak total 52 (2,13%).

Jika mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sarana dan prasarana dengan pagu siswa per rombel sebesar 32 maka layanan ini melebihi ukuran standar nasional.

Ruang Kelas menurut Kondisi Tahun 2018/2019

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Baik	2.049	1.544	
2	Rusak Ringan	3.063	223	
3	Rusak Sedang	955	150	
4	Rusak Berat	299	30	
5	Rusak Total	174	22	
	Jumlah	6.540	1.969	
1	% Baik	31,33	78,42	
2	% Rusak Ringan	46,83	11,33	
3	% Rusak Sedang	14,60	7,62	
3	% Rusak Berat	4,57	1,52	
5	% Rusak Total	2,66	1,12	

Sarana perpustakaan baru dimiliki oleh 34,51% SMP/MTs, tersebar di 166 SMP/MTs. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar SMP/MTs (65,49%) belum mempunyai perpustakaan yang dapat menjadi salah satu sumber belajar siswa. Sedangkan ketersediaan Ruang UKS baru dimiliki oleh 127 SMP/MTs (26,40%), sehingga sekitar 73,60% SMP/MTs belum memiliki UKS. Sarana Laboratorium baru dimiliki oleh 106 SMP/MTs (22,03%), sehingga ada sekitar 77,97% SMP/MTs belum memiliki Laboratorium.

Perpustakaan menurut Kondisi Tahun 2018/2019

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Baik	222	89	
2	Rusak	560	77	
	Jumlah	782	166	
1	% Baik	28,39	53,61	
2	% Rusak	71,61	46,39	

Ruang Usaha Kesehatan Sekolah menurut Kondisi Tahun 2018/2019

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTs	KET
1	Baik	137	57	
2	Rusak	82	70	
	Jumlah	219	127	
1	% Baik	62,56	44,88	
2	% Rusak	37,44	55,12	

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang dapat memberikan dampak yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun identifikasi permasalahan dalam bidang Pendidikan berdasarkan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Kab. Sampang Tidak Tamat SD/MI	42,13 %	BPS	Pendidikan Non Formal	Lembaga PKBM dikelola masyarakat	Banyak penduduk tidak tamat SD/MI
Belum Tuntasnya Buta Aksara	7,57 %	Angka Buta Huruf	Keterbatasan dana dan SDM	Hambatan social dan ekonomi	Masih tingginya angka buta huruf
Nilai USBN dan UN	61,37, 40,67	USBN/UN	Ketidak siapan Guru dan siswa	Adanya regulasi baru	Rendahnya Nilai USBN dan UN
Kapasitas dan Kinerja Guru	56,50 %	UKG	Terbatasnya dana peningkatan kapasitas	Peningkatan kapaitas mandiri rendah	Rendahnya kapasitas dan kinerja guru
Kekurangan Guru	Guru SMP 117, Guru SD 2.017	Kebutuhan guru	Kekurangan Guru PNS	Pengangkatan Guru PNS dari Pusat	Terbatasnya guru PNS
Terbatasnya sarana dan prasarana	SD 1.901, SMP 101	Kekurangan R. Kelas SD/MI, SMP/MTs	Kurangnya dana pemeliharaan	Anggaran yang terbatas	Masih ada R. Kelas yang Rusak berat dan kekurangan R. Kelas

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencapaian SDGs	Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.	Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.	
2		Sosial, Budaya dan Lingkungan Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global; (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara; (3) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal; (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008); (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan; (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga; (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (8) masih rendahnya kualitas SDM	Sosial, Budaya dan Lingkungan Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas empat Kabupaten di Wilayah Madura dan bahkan Propinsi Jawa Timur; (2) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal; (4) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan; (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan; (6) masih rendahnya kualitas SDM Kabupaten sampang untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Economy).	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Economy).		

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024 yaitu “**Sampang Hebat Bermartabat**”. Sektor pendidikan berkait pada misi ke 1: **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan 1 yaitu **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**. Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka dapat diuraikan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai berikut:

1. Faktor - Faktor Penghambat Keberhasilan

Dalam menjalankan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Sampang, faktor-faktor yang menghambat keberhasilan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang besar meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga menyulitkan tata kelola dan peningkatan kinerja ditambah lagi beragam kapasitas yang dimiliki aparatur dan kekurangan aparatur yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Besarnya sasaran pembangunan pendidikan sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mencapai kondisi yang diharapkan;

- Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, infra struktur dan keamanan sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan secara keseluruhan,

2. Faktor – faktor Pendorong Keberhasilan

Dalam menjalankan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Sampang, faktor – faktor untuk mendukung keberhasilan sebagai berikut

- Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas masalah yang akan diselesaikan. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Sampang akan sangat tergantung pada upaya terintegrasi untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang cenderung kompleks.
- Pendidikan masih merupakan prioritas dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping bidang-bidang yang lain.
- Alokasi pendanaan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang memungkinkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan, meskipun memang kebutuhannya jauh melebihi hal tersebut.
- Dukungan dana dari Pemerintah Pusat baik berupa BOS maupun dalam bentuk lainnya serta dari APBD Provinsi, asumsinya peserta didik dari keluarga miskin tidak lagi memiliki hambatan biaya dalam melanjutkan pendidikannya.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <i>Sampang Hebat Bermartabat</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
	Program			

1. Pendidikan Anak usia Dini	Belum maksimalnya APK PAUD	Sebagai besar PAUD swasta	Ada insentif pengelolaan PAUD
2. Pendidikan Sekolah Dasar	Masih terbatasnya sarana /prasarana	Sasaran yang sangat besar	Kebijakan bebas RK rusak berat
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Belum maksimalnya APM SMP/MTs	Sasaran yang besar	Kebijakan Pendidikan dan PPDB
4. Pendidikan Non Formal/ Informal	Masih adanya penduduk buta huruf	Hambatan social dan ekonomi yang tinggi	Adanya kepedulian pemerintah
	Banyaknya penduduk yang tidak tamat SD/MI	Social masyarakat	Adanya kepedulian pemerintah
5. Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kuantitas dan kapasitas	Terbatasnya anggaran	Skala prioritas
6. Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan Kurikulum 2013	Membutuhkan anggaran besar	Menekankan pendidikan karakter

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam naskah yang dimaksud adalah:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Dari visi tersebut dijelaskan ada 7 (tujuh) ekosistem pendidikan yang akan diwujudkan, yaitu (1) Sekolah yang kondusif, (2) Guru sebagai penyemangat, (3) Orang tua yang terlibat aktif, (4) masyarakat yang sangat peduli, (5) Industri yang berperan penting, (6) Organisasi profesi yang berkontribusi besar, dan (7) Pemerintah yang berperan optimal.

Misi yang diturunkan dan untuk mencapai visi di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
- b. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
- c. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
- d. Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa;
- e. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental

yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APK PAUD sebesar 78,70 %	Belum maksimalnya APK PAUD	Sebagai besar PAUD swasta	Ada insentif pengelolaan PAUD
2	Nilai rata-ta UN 6,5	Masih rendahnya kualitas pendidikan	Terbatasnya sarpras dan kekurangan Guru PNS	
3	AMH usia 15 th keatas 95,8%	Masih tingginya penduduk buta huruf	Hambatan social dan ekonomi yang tinggi	Adanya kepedulian pemerintah
4	Rata-rata lama sekolah 8,8 th	Rendahnya angka rata-rata lama sekolah	Sosial ekonomi masyarakat	Adanya PNFI

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AMH sebesar 92%	Masih tingginya penduduk buta huruf	Hambatan social dan ekonomi yang tinggi	Adanya kepedulian pemerintah
2	APM SD/MI sebesar 93 %	Masih terbatasnya sarana /prasarana	Sasaran yang sangat besar	Kebijakan bebas RK rusak berat
3	APK SMP/MTs sebesar 105 %	Masih terbatasnya sarana /prasarana	Sasaran yang sangat besar	Kebijakan bebas RK rusak berat
4	APK SM sebesar 75 %	Belum meratanya APK Dikmen	Terbatasnya lembaga Dikmen	Kebijakan Pendidikan Menengah Universal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD di tinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fasilitas Pendidikan di seluruh kecamatan	Persebaran Fasilitas pendidikan kurang merata	Jenjang PAUD sebagian besar swasta	Ada insentif bagi pengelola dan tutor PAUD
			Jenjang Dikmen belum wajib belajar sehingga kurang support dari pemerintah pusat	Adanya program pendidikan menengah universal

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisa profil layanan pendidikan yang terdiri dari analisis internal, analisis eksternal dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan pendidikan Kabupaten Sampang. Analisis internal merupakan profil pendidikan yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang. Sementara analisis eksternal meliputi analisis perkembangan penduduk usia sekolah, indeks kemiskinan penduduk, kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pendidikan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terkait dengan pendidikan. Masukan dari stakeholder diperoleh melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan stakeholders dari unsur Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, LSM, media massa, organisasi masyarakat, pengelola pondok pesantren dan madrasah diniyah.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal tersebut, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Banyak penduduk Kabupaten Sampang yang tidak tamat SD/MI yaitu sebesar 42,13%.
- 2) Belum tuntasnya Buta Aksara, yaitu sebesar 7,57%.
- 3) Rendahnya nilai rata-rata USBN dan UN, yaitu USBN sebesar 61,63 dan UNBK sebesar 41,27.
- 4) Masih rendahnya kapasitas dan kinerja guru, yang ditandai dengan nilai UKG sebesar 56,50.
- 5) Masih kurangnya Guru yang berstatus PNS pada jenjang SD dan Guru Bidang Studi tertentu di tingkat SMP.
- 6) Terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal, khususnya sarana ruang kelas, perpustakaan, laboratorium di semua jenjang beserta buku dan peralatannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD periode 2019-2024 yaitu **“Sampang Hebat Bermartabat”**. Sektor pendidikan berkait pada misi ke 1: **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan 1 yaitu **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**. Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas pendidikan Kabupaten Sampang harus mengacu pada hal tersebut.

4.1. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Visi - Misi pembangunan Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang merupakan penjabaran makna dari misi, sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Misi dan tujuan di atas, harus dapat mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga akan memiliki daya ubah yang signifikan. Dari isu strategis yang dirumuskan berdasarkan analisa profil pendidikan, maka sasaran dari tujuan setiap misi pendidikan Kabupaten Sampang 2019-2024, yang diuraikan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
KINERJA RPJMD										
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
Tujuan: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Indeks Pendidikan	N	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH										
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		1 Harapan Lama Sekolah (HLS)		11,76	12,11	12,46	12,84	13,23	13,63	14,02
		2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		4,35	4,58	4,82	5,07	5,33	5,6	5,88
Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	1. APK PAUD	%	85,43	87,5	90,58	93,67	95,9	98,1	101
	2	Angka Melek Huruf	%	92,75	93	93,5	94	94,5	95	95,5
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,4	97,9	98,3	98,7	99,1	99,6	100
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	%	74,76	75,76	76,78	77,74	78,65	79,55	80,5
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2
	7	Rata-rata Nilai USBN	N	61,63	65,15	68,45	71,25	73,75	74,15	75
	8	Rata-rata Nilai UN	N	40,67	41,7	42,68	43,72	44,68	45,7	46,72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran strategis harus dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan yang baik sehingga akan memiliki daya ubah yang signifikan. Dari isu strategis yang dirumuskan berdasarkan analisa profil pendidikan, maka Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Sampang Hebat Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
TUJUAN	Sasaran:	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Harapan Lama sekolah 2. Peningkatan Rata-rata lama sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Harapan lama sekolah melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Disiplin dan kinerja guru melalui pemasangan E-Absensi di masing-masing sekolah dan E-Report untuk Pengawas Sekolah 2. Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan guru melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 3. Memenuhi & memperbaiki kekurangan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Revisi Peraturan Bupati No. 33 tentang PKB 5. Mengusulkan kekurangan guru PNS ke Bupati Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata Penduduk yang tidak tamat SD 2. Memberi Insentif kepada penduduk yang mau masuk program paket A 3. Menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun

Visi : Sampang Hebat Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
TUJUAN	Sasaran:	STRATEGI	KEBIJAKAN
			4. Memberi Beasiswa kepada Anak Tamatan SMA/SMK yang pandai untuk meneruskan ke jenjang PT 5. Membentuk Tim Gabungan lintas Instansi (TIMPE APUS) melalui PERBUB tentang Penuntasan Buta Huruf dan Kejar Paket A.

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi layanan pendidikan yang ada saat ini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Disamping itu, mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Sampang, Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Renstra Kemendikbud, mengingat bahwa sebagian dari Rencana Strategis kabupaten akan bersinergi dalam implementasinya.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat digunakan strategi sebagai berikut.

- 1) Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sebesar 11,76 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,76 tahun atau setara dengan SMA
- 2) Peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak, RLS Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sebesar 4,35 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Sampang yang

berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 4,35 tahun atau hampir menamatkan kelas V.

Kebijakan yang dibangun dalam Renstra PD mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang terkait strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama sekolah secara garis besar terbagi pada dua hal tersebut.

Kebijakan–kebijakan untuk Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan Disiplin dan kinerja guru melalui pemasangan E-Absensi di masing-masing sekolah dan E-Report untuk Pengawas Sekolah;
- 2) Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan guru melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- 3) Memenuhi dan memperbaiki kekurangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 4) Revisi Peraturan Bupati Nomor 33 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- 5) Mengusulkan kekurangan guru PNS ke Bupati

Kebijakan-kebijakan untuk Peningkatan Angka Rata-rata Lama sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata Penduduk yang tidak tamat SD;
- 2) Memberi Insentif kepada Penduduk yang mau masuk program paket A;
- 3) Menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun;
- 4) Memberi Beasiswa kepada Anak Tamatan SMA/SMK yang pandai untuk meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi;
- 5) Membentuk gerakan Paket A dan Paket B bagi masyarakat Sampang yang tidak berijazah SD dan SMP dengan berdasarkan data Terpadu Kabupaten.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan program dan kegiatan Renstra sesuai dengan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran. Program dalam renstra Dinas Pendidikan dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten. Jika rumusan program mengakomodasi struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan yang mengedepankan fungsi, maka perlu dimunculkan sub program yang merupakan isu strategis prioritas dan merupakan integrasi antar bidang.

Kegiatan sebagai penjabaran program dirumuskan secara terintegrasi berdasarkan akar masalah dari prioritas issue strategis. Dengan demikian, kegiatan yang teridentifikasi dari upaya penyelesaian isu strategis prioritas dikelompokkan sesuai dengan jenjang pendidikan. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencakup:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Pendidikan Sekolah Dasar
3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Rincian anggaran berdasarkan sumber dana dari program tersebut diatas diuraikan secara rinci sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

DINAS PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PAGU INDIKATIF	139.750.528.700	144.811.038.700	149.306.505.693	163.005.724.108	166.449.580.335	177.328.783.210
Rincian:						
DAK	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000	32.934.769.000
BOS	69.304.200.000	72.769.410.000	76.407.880.500	80.228.274.525	84.239.688.251	88.451.672.664
DBHCHT	0	0	0	0	0	0
JASMAS DPRD	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000
PIK	2.421.700.000	4.017.000.000	4.017.000.000	4.017.000.000	4.017.000.000	4.017.000.000
JKN/BLUD	0	0	0	0	0	0
PAJAK ROKOK	0	0	0	0	0	0
DAU	34.279.859.700	34.279.859.700	35.136.856.193	45.015.680.583	44.448.123.084	51.115.341.546

Sedangkan kegiatan–kegiatan sebagai dari program tersebut diatas diuraikan secara rinci sebagaimana tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas pendidikan Kabupaten Sampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD				
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	1	Rasio Siswa PAUD per Rombel	rasio	16,23	16,10	4.536.112.500	16,00	4.536.112.500	15,80	4.676.731.988	15,60	5.144.405.186	15,40	5.303.881.747	15,20	5.675.153.469	15,20	29.872.397.391		
				2	Persentase Peserta pendidikan keaksaraan yang melek huruf	%	80,23	80,75		81,25		81,75		82,25		82,75		83,25		83,25		83,25	
				3	Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian	%	90,34	90,85		91,35		91,85		92,35		92,85		93,35		93,35		93,35	
		1.01.01.15.01	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;	1	Jumlah PAUD yang Mandapatkan Bantuan BOP	Lemba ga		700,00	296.181.000	700,00	296.181.000	700,00	305.362.611	700,00	335.898.872	700,00	346.311.737	700,00	370.553.559	700,00	1.950.488.779		
				1	Jumlah peserta Pelatihan Kurikulum K 13 bagi pendidik PAUD	Orang		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	
		1.01.01.15.02	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini	2	Jumlah Peserta Pelatihan kompetensi bagi pendidik PAUD	Orang		200,00	264.739.000	200,00	264.739.000	200,00	272.945.909	200,00	300.240.500	200,00	309.547.955	200,00	331.216.312	200,00	1.743.428.677		
				2	Jumlah Ijin Operasional Baru dan Ijin Perpanjangan PAUD	Lemba ga		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		1.01.01.15.03	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	3	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	Lemba ga		32,00	666.612.500	32,00	666.612.500	32,00	687.277.488	32,00	756.005.236	32,00	779.441.399	32,00	834.002.296	32,00	4.389.951.419		
				3	Jumlah kegiatan Lomba Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional/ Nasional	kegiat an		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
				3	Jumlah Kelompok belajar yang melaksanakan pendidikan keaksaraan	pokjar		256,00		256,00		256,00		256,00		256,00		256,00		256,00		256,00	
				3	Pembentukan TIMPE APUS	kegiat an		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				3	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	kegiat an		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		1.01.01.15.04	Penyelenggaraan Pendidikan Informal PAUD dan PNFI	4.1	Jumlah peserta Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan dan Pendidikan Keluarga	orang		100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	412.400.000	100,00	453.640.000	100,00	467.702.840	100,00	500.442.039	100,00	2.634.184.879	
				4.2	Jumlah peserta Bimtek Bagi Tutor dan Penyelenggara PAUD	orang		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00
				4.3	Jumlah Izin Operasional Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Lemba ga		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
				4.4	Jumlah PAUD /PNFI yang terakreditasi	Lemba ga		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00
		1.01.01.15.05	Pembangunan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar PAUD dan PNFI	5.1	Jumlah gedung sekolah bertambah	unit		6,00	2.820.885.000	6,00	2.820.885.000	6,00	2.908.332.435	6,00	3.199.165.679	6,00	3.298.339.815	6,00	3.529.223.602	6,00	18.576.831.530	
				5.2	Jumlah ruang kelas sekolah bertambah	ruang kelas		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
				5.3	Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir bertambah	paket		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
				5.4	Jumlah bangunan sekolah yang direhab	unit		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
				5.5	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	unit		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
		1.01.01.15.06	Pengadaan/Pem eliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD dan PNFI	6.1	Jumlah meubeler bertambah	Lemba ga		6,00	87.695.000	6,00	87.695.000	6,00	90.413.545	6,00	99.454.900	6,00	102.538.001	6,00	109.715.661	6,00	577.512.107	
		1.01.01.16	Program Pembinaan Sekolah Dasar	1	Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A	%	109,32	108,50	82.337.725.000	108,00	85.198.235.000	17,50	87.839.380.285	107,00	95.523.318.314	106,50	96.875.219.961	106,00	102.884.217.610	106,00	550.658.096.170	
2	Rasio Siswa SD/MI per Rombel			Rasio	15	15,50		16,00		16,50		-	17,00		-	17,50		-	18,00		-	
3	Persentase Sekolah SD kondisi bangunan baik			%	77,48	79,50		81,50		83,50		-	85,50		-	87,50		-	90,50		-	
4	Angka kelulusan (AL) SD/MI			%	99,53	99,54		99,55		99,56		-	99,57		-	99,58		-	99,59		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
				5	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,72	96,74	96,76	96,78	-	96,80	-	96,82	96,84	-	96,84	-		
				6	Persentase SD berakreditasi minimal B	%	66,30	66,55	66,80	67,05		67,30		67,55	67,80		67,80			
		1.01.01.16.01	Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar	1.1	Jumlah peserta Pelatihan Guru Kelas Kurikulum 2013	guru		200,00	300,00	300,00	1.150.630.380	300,00	1.173.642.988	300,00	1.197.115.847	300,00	1.221.058.164	300,00	1.245.479.328	
				1.2	Jumlah peserta Pelatihan CTL/Literasi	guru		50,00	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00		50,00			
				1.3	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Muatan Lokal/Pramuka	guru		50,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00			
				1.4	Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran	guru		50,00	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00		50,00			
				1.5	Jumlah peserta Pelatihan Inovasi Pembelajaran	guru		180,00	200,00	200,00		200,00		200,00	200,00		200,00			
				1.6	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran bagi Guru Al-Qur'an	guru		36,00	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00		50,00			
				1.7	Jumlah guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif	guru		105,00	110,00	115,00		120,00		125,00	130,00		130,00			
				1.8	Jumlah Monitoring dan Evaluasi KBM	lembaga		117,00	124,00	124,00		124,00		124,00	124,00		124,00			
		1.01.01.16.02	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	2.1	Jumlah peserta USBN	siswa		13000	782.950.000	13000	798.609.000	13000,00	814.581.180	13000,00	830.872.804	13000,00	847.490.260	13000,00	864.440.065	
				2.2	Jumlah Peserta Try Out	siswa		13000		13000		13000,00		13000,00		13000,00		13000,00		
		1.01.01.16.03	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah dasar	3.1	Jumlah Siswa SD berprestasi yang terjamin di Tingkat Provinsi	siswa		168,00	406.288.000	168,00	406.288.000	170,00	406.288.000	172,00	406.288.000	174,00	406.288.000	175,00	406.288.000	
				3.2	Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	lembaga		685,00		685,00		690,00		693,00		694,00		695,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
				3.3	Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	orang		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00			
				3.4	Persentase SD yang Ber UKS	%		80,00		80,00		85,00		87,00		88,00		89,00		90,00	
				3.5	Persentase Pemenang Lomba OSN, FLS2N dan O2SN di tingkat Provinsi	%		20,00		20,00		25,00		26,00		26,00		27,00		28,00	
		1.01.01.16.04	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Dasar	4.1	Jumlah Dana BOS yang di berikan untuk SD dan Madin	sekolah		617,00	55.617.962.00	617,00	57.318.394.00	617,00	59.921.005.725	617,00	67.565.639.523	617,00	68.877.450.854	617,00	74.845.556.381	617,00	395.965.649.976
				4.2	Jumlah Monev yang dilakukan ke sekolah Penerima BOS	lembaga		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	
		1.01.01.16.05	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Dasar SD	5.1	Jumlah ruang kelas sekolah bertambah	RK		30,00	22.366.627.500	24,00	23.409.875.000	24,00	23.409.875.000	24,00	23.409.875.000	24,00	23.409.875.000	24,00	23.409.875.000	24,00	139.416.002.500
				5.2	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir bertambah	Paket		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.3	Jumlah bangunan toilet bertambah	Ruang		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
				5.4	Jumlah bangunan rumah dinas guru bertambah	Unit		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
				5.5	Jumlah ruang kelas yang direhab	RK		199,00		231,00		231,00		231,00		231,00		231,00		231,00	
				5.6	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	Ruang		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
				5.7	Jumlah toilet sekolah yang direhab	Unit		28,00		28,00		28,00		28,00		28,00		28,00		28,00	
		1.01.01.16.06	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	6.1	Jumlah meubelair ruang kelas sekolah	Paket		7,00	2.057.947.500	11,00	2.137.000.000	11,00	2.137.000.000	11,00	2.137.000.000	11,00	2.137.000.000	11,00	2.137.000.000	11,00	12.742.947.500
				6.2	Jumlah buku koleksi perpustakaan	Paket		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1.01.01.17	Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	102,11	102,20	38.224.440.950	102,22	40.224.440.950	102,24	41.471.398.619	102,26	45.487.106.327	102,28	46.897.206.623	102,30	50.180.011.087	102,30	262.484.604.556	
						27,20		27,40		27,60	-	27,80	-	28,00	-	28,20	-	28,20	-	
						87,12	87,72	88,22		88,72	-	89,22	-	89,72	-	90,22	-	90,22	-	
						97,53	97,60	97,63		97,66	-	97,70	-	97,73	-	97,75	-	97,75	-	
						77,87	77,90	77,93		77,96		77,99		78,02		78,05		78,05		
						25,84	26,09	26,34		26,59		26,84		27,09		27,34		27,34		
1.01.01.17.01	Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Jumlah peserta pelatihan dan pengembangan kurikulum SMP	guru	300,00	557.600.000	300,00	586.775.051	300,00	604.965.077	300,00	663.544.315	300,00	684.114.189	300,00	732.002.182	300,00	3.829.000.814		
						1	Jumlah peserta Pembinaan MGMP	orang	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
						1	Jumlah peserta Pelatihan pengembangan contextual teaching and learning (CTL)	guru	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
						1	Jumlah peserta pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis TIK	guru	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
						1	Jumlah kegiatan monev	lembaga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.01.01.17.02	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	2	Jumlah peserta UAN	siswa	7000,00	399.550.000	7000,00	420.455.473	7000,00	433.489.592	7000,00	475.464.726	7000,00	490.204.132	7000,00	524.518.421	7000,00	2.743.682.344		
						2	Jumlah Monev yang dilaksanakan	lembaga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.01.01.17.03	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah	3	Jumlah Siswa SMP berprestasi yang terjamin di Tingkat Provinsi	orang	9,00	1.165.542.000	9,00	1.226.526.123	9,00	1.264.548.433	9,00	1.386.995.639	9,00	1.429.992.503	9,00	1.530.091.979	9,00	8.003.696.676		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD			
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Menengah Pertama	3.2	Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	lembaga		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		
				3.3	Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	lembaga		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		
				3.4	Persentase SMP yang Ber UKS	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				3.5	Persentase Pemenang Lomba OSN,FLS2N, Gala Siswa dan O2SN SMP di tingkat Provinsi	%		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		
				3.6	Jumlah Peserta yang ikut P4GN	lembaga		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		
				3.7	Jumlah peserta yang ikut Pekan Seni Pelajar	lembaga		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		
				3.8	Jumlah peserta yang ikut Gala Siswa	lembaga		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		
		1.01.01.17.04	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama	4.1	Jumlah Penerima Bantuan Operasional sekolah	lembaga		267,00	14.002.334.000	267,00	14.734.971.739	267,00	15.191.755.863	267,00	16.662.785.371	267,00	17.179.331.718	267,00	18.381.884.938	267,00	96.153.063.629	
				4.2	Jumlah sekolah yang mendapatkan Program PIP	lembaga		267,00		267,00		267,00		267,00		267,00		267,00		267,00		
		1.01.01.17.05	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar Sekolah Menengah Pertama	5.1	Jumlah Ruang kelas baru bertambah	RK		9,00	17.583.920.950	9,00	18.503.956.431	9,00	19.077.579.080	9,00	20.924.875.865	9,00	21.573.547.017	9,00	23.083.695.308	9,00	120.747.574.651	
				5.2	Jumlah Ruang Lab. IPA bertambah	Ruang		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				5.3	Jumlah perpustakaan sekolah bertambah	Unit		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				5.4	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	RK		56,00		56,00		56,00		56,00		56,00		56,00		56,00		
				5.5	Jumlah bangunan taman, lapangan upacara dan parkir bertambah	Paket		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RPJMD			
								2019		2020		2021		2022		2023				2024	
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.
				5.6	Jumlah ruang guru yang direhab	Paket		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
				5.7	Jumlah Jamban guru/siswa bertambah	Unit		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00			
				5.8	Jumlah bangunan rumah dinas guru bertambah	Paket		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
		1.01.17.06	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Menengah Pertama	6.1	Jumlah meubeler RKB bertambah	Paket		7,00	4.515.494.000	7,00	4.751.756.134	7,00	4.899.060.574	7,00	5.373.440.411	7,00	5.540.017.064	7,00	5.927.818.258	7,00	31.007.586.442
				6.2	Jumlah peralatan LAB Komputer bertambah	Paket		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00			
				6.3	Jumlah alat praktek dan peraga siswa	Paket		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
		1.01.18.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1	Rasio guru terhadap murid SD/MI	01.15	13,00	13,30	10.493.020.000	13,50	10.493.020.000	13,70	10.818.303.620	14,00	11.900.133.982	14,20	12.269.038.135	14,50	13.127.870.805	14,50	69.101.386.542
				2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	01.20	13,00	13,20		13,60		13,90	-	14,20	-	14,50	-	14,70	-	14,70	-
				3	Prosentase guru yang memenuhi standar kualifikasi	%	89,86	90,00	10.493.020.000	90,50	10.493.020.000	90,86	10.818.303.620	91,86	11.900.133.982	92,86	12.269.038.135	93,86	13.127.870.805	93,86	-
		1.01.18.01	Peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	1.1	Jumlah calon Kepala sekolah yang memenuhi Standar	orang		70,00	945.227.500	70,00	945.227.500	70,00	970.511.120	70,00	1.156.253.339	70,00	1.290.705.416	70,00	1.527.466.576	70,00	6.835.391.451
				1.2	Jumlah Calon Pengawas yang memenuhi standar	orang		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00	
				1.3	Jumlah Guru, Pengawas, Pamong Belajar dan penilik yang memenuhi angka kredit	orang		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	
		1.01.18.02	Perencanaan dan Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	2.1	Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Literasi	guru		625,00	8.792.003.250	625,00	8.792.003.250	625,00	8.892.003.250	625,00	9.602.349.175	625,00	9.702.349.175	625,00	10.114.659.525	625,00	55.895.367.625
				2.2	Jumlah GTT penerima HR GTT	GTT		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00	
				2.3	Jumlah Guru yang bersertifikasi	Guru		112,00		112,00		112,00		112,00		112,00		112,00		112,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		1.01.01.18.03	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	3 - 1	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang Berprestasi	orang		42,00	755.789.250	42,00	755.789.250	42,00	955.789.250	42,00	1.141.531.468	42,00	1.275.983.544	42,00	1.485.744.704	42,00	6.370.627.466
				3 - 2	Jumlah Monev kinerja Guru, Pengawas sekolah	orang		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00	
		1.01.01.19.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Persentase informasi/data base pendidikan yang terupdate	%	96,90	97,20	428.000.000	97,50	-	97,80	-	98,20	-	98,50	-	98,80	-	98,80	428.000.000
		1.01.01.19.01	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 - 1	Jumlah kegiatan Data Pokok Pendidikan yang tersusun	%	100,00	100,00	275.000.000												275.000.000
				1 - 2	Jumlah kegiatan Evaluasi kinerja bidang pendidikan	%	100,00	100,00													
				1 - 3	Jumlah Rapat koordinasi Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	1,00	1,00													
		1.01.01.19.02	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan	2 - 1	Jumlah kegiatan Peningkatan hân besar pendidikan	Kegiatan	2,00	3,00	153.000.000												153.000.000
		1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%	100,00	100,00	2.576.419.000	100,00	2.576.419.000	100,00	2.656.287.989	100,00	2.921.916.788	100,00	3.012.496.208	100,00	3.223.370.943	100,00	16.966.909.928
		1.01.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 - 1	Jumlah surat terkirim	surat	3500,00	3500,00	1.795.100.000	3500,00	1.795.100.000	3500,00	1.850.748.100	3500,00	2.035.822.910	3500,00	2.098.933.420	3500,00	2.245.858.760	3500,00	11.821.563.190
				1 - 2	Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang terbayar	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
				1 - 3	Jumlah Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas operasional kendaraan selama 1 tahun	unit	380,00	380,00		380,00		380,00		380,00		380,00		380,00		380,00	
				1 - 4	Jumlah kegiatan jasa kebersihan kantor yang terlaksana	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
				1.5	Jumlah kegiatan tenaga teknis dan tenaga keamanan yang terlaksana	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
		1.01.01.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	2.1	Jumlah kebutuhan ATK selama setahun	bulan	12,00	12,00	538.874.000	12,00	538.874.000	12,00	555.579.094	12,00	611.137.003	12,00	630.082.251	12,00	674.188.008	12,00	3.548.734.356
				2.2	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
				2.3	jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
				2.4	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
				2.5	Jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang tersedia	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
				2.6	jumlah makan dan minum selama setahun	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
		1.01.01.01.3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	3.1	Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	OK		1100,00	242.445.000	1100,00	242.445.000	1100,00	249.960.795	1100,00	274.956.875	1100,00	283.480.538	1100,00	303.324.175	1100,00	1.596.612.382
				3.2	Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	OK		1344,00		1344,00		1344,00		1344,00		1344,00		1344,00		1344,00	
		1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	899.000.000	100,00	899.000.000	100,00	926.869.000	100,00	1.019.555.900	100,00	1.051.162.133	100,00	1.124.743.482	100,00	5.920.330.515
		1.01.01.02.01	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	1.1	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	lembaga		15,00	500.000.000	15,00	500.000.000	15,00	515.500.000	15,00	567.050.000	15,00	584.628.550	15,00	625.552.549	15,00	3.292.731.099
				1.2	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara dengan baik	lembaga		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
		1.01.01.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	2.1	Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas yang terlaksana	unit		5,00	149.000.000	5,00	149.000.000	5,00	153.619.000	5,00	168.980.900	5,00	174.219.308	5,00	186.414.659	5,00	981.233.867

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD		
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		1.01.01.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.1	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap	lembaga		15,00	250.000.000	15,00	250.000.000	15,00	257.750.000	15,00	283.525.000	15,00	292.314.275	15,00	312.776.274	15,00	1.646.365.549
				3.2	Jumlah Komputer, laptop dan printer	unit		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00	
		1.01.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100,00	100,00	40.150.000	100,00	40.150.000	100,00	47.719.443	100,00	52.491.387	100,00	54.118.620	100,00	57.906.924	100,00	292.536.374
		1.01.01.03.01	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi /Seminar	1.1	Jumlah pengiriman pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana	bulan	12,00	12,00	40.150.000	12,00	40.150.000	12,00	47.719.443	12,00	52.491.387	12,00	54.118.620	12,00	57.906.924	12,00	292.536.374
		1.01.01.04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100,00	100,00	215.661.250	100,00	843.661.250	100,00	869.814.749	100,00	956.796.224	100,00	986.456.907	100,00	1.055.508.890	100,00	4.927.899.269
		1.01.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1.1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	buku	10,00	10,00	122.240.000	10,00	172.240.000	10,00	177.579.440	10,00	195.337.384	10,00	201.392.843	10,00	215.490.342	10,00	1.084.280.009
				1.2	Jumlah Dokumen laporan keuangan semester	buku	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
				1.3	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	buku	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
				1.4	Jumlah Dokumen daftar gaji	bulan	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
		1.01.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	2.1	Jumlah dokumen RKA-DPA SKPD	Dokumen	2,00	2,00	30.071.250	2,00	55.071.250	2,00	56.778.459	2,00	62.456.305	2,00	64.392.450	2,00	68.899.922	2,00	337.669.635
				2.2	Jumlah dokumen Renja SKPD	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				2.3	Jumlah dokumen Renstra SKPD	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		1.01.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	3.1	Jumlah Program/kegiatan unggulan yang ditampilkan	kegiatan	2,00	63.350.000	2,00	616.350.000	2,00	635.456.850	2,00	699.002.535	2,00	720.671.614	2,00	771.118.627	2,00	3.505.949.625
			JUMLAH					139.750.528.700		144.811.038.700		149.306.505.693		163.005.724.108		166.449.580.335		177.328.783.210		940.652.160.746

6.2. Indikator Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Disdik selama periode tahun 2019-2024 diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan indikator dan target kinerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2019–2024 sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 5.1 tingkat keberhasilannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Rincian tentang indikator dan target kegiatan disajikan pada Lampiran Matriks Kegiatan Renstra Disdik Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Disdik selama periode tahun 2019 – 2024 diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indeks Pendidikan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat								
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,76	12,11	12,66	13,24	13,83	14,23	14,82	14,82
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4,35	4,58	4,92	5,17	5,43	5,7	6,18	6,18
	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan								
1	APK PAUD	85,43%	87,50%	90,58%	93,67%	95,90%	98,10%	101%	101%
2	Angka Melek Huruf	92,75%	93%	93,50%	94%	94,50%	95%	95,50%	95,50%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,40%	97,90%	98,30%	98,70%	99,10%	99,60%	100%	100%
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,08%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	74,76%	75,76%	76,78%	77,74%	78,65%	79,55%	80,50%	80,50%
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%
7	Rata-rata Nilai USBN	61,63	65,15	68,45	71,25	73,75	74,15	75	75
8	Rata-rata Nilai UN	40,67	41,7	42,68	43,72	44,68	45,7	46,72	46,72

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan adalah indikator kinerja dampak (*impact*), sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*).

BAB VIII

P E N U T U P

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Penerapan semua ketentuan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, maupun aset dan anggaran yang sangat besar memiliki kompleksitas paling tinggi diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Disamping itu tuntutan masyarakat yang besar akan keberhasilan pendidikan menjadikan beban yang makin berat.

Tantangan yang diuraikan di atas memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Semoga dokumen Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2019 - 2024 ini dapat menjadi panduan dan arahan bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Sampang kedepannya.